



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
INSPEKTORAT II**

TAHUN 2024

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, Februari 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas Inspektorat II selama tahun 2024, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku Inspektur II mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur II, 

Winky Angga Priatna



IKHTISAR EKSEKUTIF **(EXECUTIVE SUMMARY)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang mewajibkan setiap unit kerja sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat II sebagai bagian unit kerja Inspektorat Jenderal dan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan, memiliki kewajiban dalam mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Vertikal Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo.

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal cakupan tugas Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2024 (Oktober - Desember) realisasi Anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.139.535.000,- atau sebesar 33,03% dari pagu anggaran sebesar Rp3.450.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 24,76%. Adapun capaian fisik sampai dengan Triwulan IV (Januari - Desember) sebesar 100% dan realisasi anggaran Rp2.975.970.000,- atau sebesar 86,26% dengan sisa anggaran sebesar Rp474.030.000,-

Berdasarkan Aplikasi Sakti Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) sebesar 99,87 % atau Rp2.975.993.447,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp 2.980.000.000,- (Pagu efektif setelah dikurangi Blokir) dengan sisa anggaran Rp4.006.553,-

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan Anggaran yang digunakan pada aplikasi PP 39 belum dipotong Anggaran Blokir.

Berikut Analisis capaian indikator kinerja Inspektorat II tahun 2024:

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 0,8%, realisasi capaian kinerja tahun 2024 adalah 0% (Nol Persen) berdasarkan Realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal ILMATE, Direktorat Jenderal IKMA, dan BPIPI Sidoarjo senilai Rp 781.052.401.748,- dan total temuan BPK adalah 0% (tidak ada temuan material).
2. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi kinerja tahun 2024 sesuai cakupan tugas Inspektorat II senilai 100%. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 adalah sebesar 100%, jumlah pengaduan yang diterima sampai dengan TW IV (Januari – Desember Tahun 2024) sebanyak 16 kali pengaduan, seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Data pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR), semua pengaduan telah selesai ditindaklanjuti dan tidak ada yang berkadar pengawasan, serta telah disampaikan seluruhnya kepada masing-masing unit terkait untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Adapun pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sebagaimana mestinya.
3. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II target 92,2% dengan realisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 100%. Dari 4 temuan dengan 7 rekomendasi, Seluruhnya telah ditindaklanjuti dan telah sesuai rekomendasi. Indikator Kinerja ini telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I, Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 100%. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Nomor B/635/IJ-IND.1/PW/IV/2024 pada Triwulan I Inspektorat II telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

4. Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target 3, realisasi tahun 2024 adalah 3,728. Indeks MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 992/IJ-IND.1/PW/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024. Capaian Kinerja tahun 2024 adalah 124,27%. Setelah dilaksanakan Penjaminan Kualitas, secara umum masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan (**area of improvement**) sebagai berikut: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan.
5. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II dengan target 85%, pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dalam hal ini satuan Kerja cakupan tugas Inspektorat II. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 89,26%, atau klasifikasi “Sangat Baik”, sehingga capaian kinerja tahun 2024 adalah 105%.
6. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 80%, pengukuran indikator pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada kegiatan audit. Pada Tahun 2024 telah dilakukan audit pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo, dan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian Provinsi, realisasi kinerja tahun 2024 (Januari-Desember) sebesar 94,75%. Capaian kinerja dari bulan Januari-Desember tahun 2024 sebesar 118,44%.
7. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa dengan target 90%. Indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran belanja P3DN Inspektorat II yaitu 521811, 521211, 524114, dan 524119 dengan total nilai sebesar Rp796.490.000,- (Anggaran setelah revisi) dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar

Rp795.651.181- sehingga realisasi kinerja sebesar 99,89%. Capaian kinerja tahun 2024 adalah 110,98%. Realisasi ini dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Aplikasi SAKTI.

8. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 100%. Realisasi kinerja tahun 2024 adalah 100%. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas Inspektorat II mempunyai 52 kegiatan yang ada dalam PKPT adalah sebesar 100%, pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT). Pada Triwulan IV Inspektorat II telah melakukan revisi PKPT untuk optimalisasi pengawasan sesuai dengan Surat Inspektur Nomor 34/IJ-IND.3/PR/XI/2024 tanggal 4 November 2024.
9. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100%. Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Penugasan yang perannya dinaikkan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang dimiliki sesuai dengan Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2022 Pasal 10 yakni dalam hal suatu unit kerja APIP tidak terdapat Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatan untuk melaksanakan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), Auditor yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan APIP yang bersangkutan. Pada pedoman pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal kondisi tersebut diperbolehkan karena tidak akan mempengaruhi capaian nilai tingkat kesesuaian penugasan SDM. Realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100%. Naik atau turun jenjang jabatan ini disebabkan kurangnya jumlah auditor pertama, sehingga auditor muda diperankan sebagai anggota tim.

Tabel Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian	Ket
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	0,8%	0%	200%	Tercapai Target
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	100%	100%	100 %	Tercapai Target
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *) IKU	92,2%	100%	108,46 %	Tercapai Target
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3 Indeks	3,728 Indeks	124,27%	Tercapai Target
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%	89,26%	105%	Tercapai Target
		2. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80%	94,75%	118,44%	Tercapai Target
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	90%	99,89%	110.98%	Tercapai Target
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100 %	100 %	Tercapai Target
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100 %	100 %	Tercapai Target

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat II	1
B. Latar Belakang Kegiatan Program	1
C. Struktur Organisasi	4
D. Cakupan Tugas	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Organisasi	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	12
C. Rencana Anggaran Tahun 2024	21
D. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Analisis Capaian Kinerja	30
B. Akuntabilitas Keuangan	63
C. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	83
BAB IV : PENUTUP	91
Tinjauan Umum Keberhasilan dan Permasalahan/Kendala	91
A. Keberhasilan	91
B. Permasalahan / Kendala	91
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	92

DAFTAR TABEL

1.	Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2024	14
2.	Rencana Kinerja TA 2025	21
3	Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2024	22
4.	Perjanjian Kinerja TA 2024	25
5.	Target dan capaian output Inspektorat II Tahun 2024	29
6.	Capaian Kinerja yang Telah Dilaksanakan pada Tahun 2024	30
7.	Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024	43
8.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat II Tahun 2020 - 2024	57
9.	Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Saakti	64
10.	Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Aplikasi Sakti TA 2024	69
11.	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan TA. 2024	70
12	Realisasi Keuangan per Triwulan 2024 berdasarkan Data Aplikasi PP39	73
13	Realisasi Keuangan per Triwulan 2023 berdasarkan Data Aplikasi PP39	74
14	Realisasi Keuangan per Triwulan 2022 berdasarkan Data Aplikasi PP39	75
15	Realisasi Keuangan per Triwulan 2021 berdasarkan Data Aplikasi PP39	76
16	Realisasi Keuangan per Triwulan 2020 berdasarkan Data Aplikasi PP39	77
17	Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan 2024	79

DAFTAR GRAFIK

1.	Struktur Organisasi Inspektorat II	4
2.	Perkembangan RealisasiCapaian Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Tahun 2020-2024	32
3.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Tahun 2020-2024	33
4.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II Tahun 2020-2024	34
5.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin Tahun 2020-2024	35
6.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II Tahun 2020-2024	37
7.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) Tahun 2020-2024	38
8.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa Tahun 2020-2024	39
9.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT Tahun 2020-2024	41
10.	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Tahun 2020-2024	42
11.	RPJMN 2020 - 2024	61
12.	Perkembangan Realisasi Keuangan Triwulanan Tahun 2020- 2024	78
13.	Realisasi keuangan perkegiatan tahun 2020-2024	80

LAMPIRAN

93

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT II

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pada pasal 206, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 207 yakni:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga dan manajemen kinerja Inspektorat II.

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat II telah menyusun program kegiatan tahun 2024 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2024, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2024 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, yaitu :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai **Counseling Partner** (Mitra Kerja);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan, serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan PIKM pada Dinas Perindustrian Provinsi, dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu/Audit Khusus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana

telah disampaikan di atas. Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)** di unit yang menjadi cakupan tugasnya. Sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 78 Tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Inspektorat II mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL)** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat II agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku, dan kegiatan **Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Pada Tahun 2024 Inspektorat II melaksanakan tiga kegiatan **monitoring dan evaluasi (Monev) yaitu:** Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja cakupan Tugas Inspektorat II; Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Mesin dan Peralatan Pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA. Selain itu Inspektorat II sebagai *consulting partner* bagi satuan kerja cakupan tugasnya melaksanakan kegiatan **Konsulting dan pengawalan kegiatan prioritas pada cakupan tugas Inspektorat II.**

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat II tersebut, Inspektorat II didukung dengan kegiatan **Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II** serta **Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II.**

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

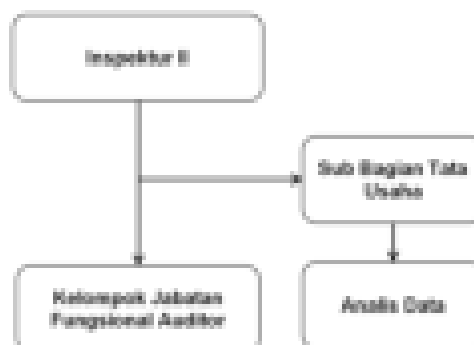
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Tugas Jabatan Kelompok Fungsional Auditor adalah melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.

Pada tahun 2024 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 19 orang ASN dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 14 (Empat belas) orang Auditor, 1 (satu) orang Pelaksana, serta dibantu oleh 2 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN).

Struktur organisasi Inspektorat II dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 1. Struktur Organisasi Inspektorat II

Dukungan personil Inspektorat II per 31 Desember 2024, terdiri dari:

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Inspektur	1
2	Kasubag Tata Usaha	1
4	Auditor Utama	1
5	Auditor Madya	3
6	Auditor Muda	8
7	Auditor Pertama	2
8	Analisis Evaluasi Audit	1
9	PPNPN	2
TOTAL		19

D. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II memiliki kewajiban melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Cakupan tugas Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Unit Pusat, yaitu:

- a) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE);
- b) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA);

2. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yaitu Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo dan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) Denpasar Bali;

3. Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Industri pada Dinas yang menangani Perindustrian dari 38 (Tiga Puluh Delapan Provinsi) yaitu:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh;
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
- 5) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
- 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau;
- 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;
- 8) Dinas Perindustrian Provinsi. Sumatera Selatan;
- 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung;
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
- 11) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. DKI Jakarta;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa. Yogyakarta;
- 15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- 16) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat;
- 17) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- 18) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Nusa Tenggara Timur;
- 20) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara;
- 21) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- 22) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- 23) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan;

- 24) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi. Kalimantan Timur;
- 25) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Gorontalo;
- 26) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara;
- 27) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat;
- 28) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- 29) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tenggara;
- 30) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan;
- 31) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara;
- 32) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku;
- 33) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua;
- 34) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat;
- 35) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat.Daya;
- 36) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan;
- 37) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah;
- 38) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Pegunungan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengembangkan misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- g. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu **“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”** yang bercirikan:

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

4. Strategi pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode 2020-2024 juga merupakan turunan **(cascading)** dari sasaran strategis serta Indikator Kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat II;
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan Tugas Inspektorat II;
- c. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- d. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian dimana Inspektorat II merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (**watch dog**) menjadi pembinaan (**counseling partner**) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (**quality assurance**). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan risiko, **control**, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani risiko.

2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan hasil yang diperoleh **(input, process, output, outcome, impact)**, untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

5. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- b. Menerapkan audit berbasis risiko.

6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Dinas Perindustrian Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Pada tahun 2024 obyek pengawasan Inspektorat II sebanyak 42 (empat puluh dua) Unit kerja terdiri dari: 2 (dua) Unit Eselon I, 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT), 38 Dinas Perindustrian Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan RPJM, Renstra, dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dan peruntukan BMN yang efisien dan efektif sesuai peraturan perundangan;
- c. Pengawasan Pelayanan Publik, dilakukan untuk memastikan pelayanan public yang dilakukan satker dibawah cakupan tugas Inspektorat II, telah memenuhi Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2024 Inspektorat II memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian** sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran strategis Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal oleh satker cakupan tugas Inspektorat II*)IKU
 - b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II;
 - c. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan tugas Inspektorat II*)IKU

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja yaitu Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II;
 - b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK).
2. Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri dengan indikator kinerja yaitu Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU.

Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT; dan
 - b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Tabel 1. Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8%	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,8% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2024
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *)IKU	92,2%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan cakupan Tugas Inspektorat II yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus : $(SR+BSR)/total \text{ rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)}$
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Indeks penerapan manajemen risiko(MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3 Indeks	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan, dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan).
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIP. Pada tahun 2024, kuesioner disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner.
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshot)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor • Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel, SQL, Access, dll) • Bukti Hasil Telaahan pada semua kegiatan Pengawasan • Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam, Gdrive, dll) • Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data • Tahap menggunakan Pelaporan Microsoft Office.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	90%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (R_{P3DN})= Keterangan: $\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotA_{P3DN} = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki.

Tabel 2. Rencana Kinerja Inspektorat II TA 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Inspektorat II	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Cakupan Tugas Inspektorat II	0,5
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2024 Cakupan Tugas Inspektorat II	80
		Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal Tahun 2015 - 2023 Cakupan Tugas Inspektorat II	20
		Nilai SAOP Cakupan Tugas Inspektorat II	79,5
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Cakupan Tugas Inspektorat II	90,7

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Inspektorat II pada tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap cakupan tugasnya didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.450.000.000,-. Pada bulan Januari 2024 anggaran tersebut diblokir sebesar Rp 350.000.000,-, melalui mekanisme ***Automatic Adjustment*** (AA) dan pada bulan November 2024 dalam rangka penghematan perjalanan dinas dilakukan pemotongan sebesar Rp 120.000.000,-, sehingga anggaran efektif Inspektorat II menjadi Rp 2.980.000.000,- yang terdiri dari kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, dan layanan audit internal Inspektorat II, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 3. Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2024

Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal	Pagu Revisi
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		3.450.000.000	2.980.000.000
1842.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	32 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.450.000.000	2.980.000.000
1842.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	19.828.000	19.828.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		19.828.000	19.828.000
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II		19.828.000	19.828.000
1842.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	97.640.000	97.640.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II		97.640.000	97.640.000
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kinerja Inspektorat II Triwulanan dan Tahunan		97.640.000	97.640.000
1842.EBD.965	Layanan Audit Internal	26 Laporan	3.332.532.000	2.862.532.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		1.388.793.000	839.521.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		121.516.000	4.426.000
B	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan Penumbuhan		161.496.000	49.537.000

Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal	Pagu Revisi
	Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo			
C	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi PIKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi		1.016.805.000	784.558.000
D	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		88.976.000	1.000.000
E	Blokir Kebijakan Perjalanan Dinas		58.120.000	
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		139.769.000	119.037.000
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara		80.050.000	78.218.000
B	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan		31.067.000	22.967.000
C	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		8.926.000	8.926.000
D	Reviu Rencana Kerja Anggaran		19.726.000	8.926.000
053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		863.222.000	677.931.000
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		5.926.000	5.803.000
B	Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		428.648.000	327.991.000
C	Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Mesin dan Peralatan Pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA		428.648.000	344.137.000
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		884.254.000	1.218.656.000
A	Pengawasan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal IKMA		234.492.000	686.134.000

Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal	Pagu Revisi
B	Pengawasan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal ILMATE		212.532.000	155.056.000
C	Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II		437.230.000	377.466.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II		56.494.000	7.387.000
A	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		56.494.000	7.387.000

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024, sasaran Inspektorat II pada tahun 2024 berubah menjadi seperti tabel 4. Dimana pada tahun 2023 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada cakupan Inspektorat II)*IKU diganti menjadi Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II)*IKU.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui:

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian (**assurance**) melalui Layanan Audit Inspektorat II dan Layanan Reviu Inspektorat II.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (**consulting**) melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II.
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif melalui layanan Reviu RKA-KL satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II.
4. Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri melalui penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II
5. Terselenggaranya Sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien melalui layanan Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja TA 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	0,8%
		S2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	100%
		S3	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *IKU	92,2%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3,00 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	S1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%
		S2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	S1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	90%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	S1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%
		S2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat II Tahun 2024 antara lain:

- Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU;
- Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *) IKU;
- Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU;
- Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU.

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Layanan Audit Inspektorat II:
 - Audit Kepatuhan dan Kinerja ;

- b) Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- c) Audit dengan Tujuan Tertentu;
- 2. Layanan Reviu Inspektorat II :
 - a) Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - b) Reviu PIPK (Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan);
 - c) Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL;
 - d) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)
- 3. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:
 - a) Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b) Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
 - c) Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Mesin dan Peralatan Pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA;
- 4. Pengawasan **dan Consulting**
 - a) Pengawasan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal IKMA;
 - b) Pengawasan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal ILMATE;
 - c) Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan;
- 5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat II.
- 6. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II.

Tabel 5. Target dan capaian output Inspektorat II Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
003	Audit Program dan Kegiatan Pada satker Cakupan Tugas inspektorat II	5 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
004	Reviu pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	12 Dokumen	6 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen
005	Monitoring dan Evaluasi	4 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen
006	Konsulting dan Pengawasan pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen
007	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2024. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 6. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian	Ket
PERSSEFEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	0,8%	0%	200%	Tercapai Target
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	100%	100%	100 %	Tercapai Target
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *) IKU	92,2%	100%	108,46 %	Tercapai Target
2.	Terwujudnya tata kelola	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	3 Indeks	3,728 Indeks	124,27%	Tercapai Target

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	pemerintahan yang baik	Kementerian Perindustrian *)IKU				
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%	89,26%	105%	Tercapai Target
		2. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80%	94,75%	118,44%	Tercapai Target
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	90%	99,89%	110,98%	Tercapai Target
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100 %	100 %	Tercapai Target
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100 %	100 %	Tercapai Target

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target kinerja Inspektorat II dapat dicapai, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar meskipun ada sedikit hambatan berupa revisi anggaran tiap bulan disebabkan penyesuaian Aplikasi Sakti Kementerian Keuangan, sehingga proses realisasi anggaran sedikit mengalami keterlambatan, sementara itu realisasi fisik adalah sebesar 100 % Berikut Analisis capaian indikator kinerja Inspektorat II tahun 2024:

• **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

1. Meningkatnya efektivitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (*assurance*)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	0,8%	0%	200 %
		b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	100%	100%	100 %
		c. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	92,2%	100%	108,46%

1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 0,8%, realisasi capaian kinerja tahun 2024 adalah 0% (Nol Persen) berdasarkan Realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal ILMATE, Direktorat Jenderal IKMA, dan BPIPI Sidoarjo senilai Rp 781.052.401.748,- dan total temuan BPK adalah 0% (tidak ada temuan material).

Batas Toleransi Temuan Material Inspektorat II =

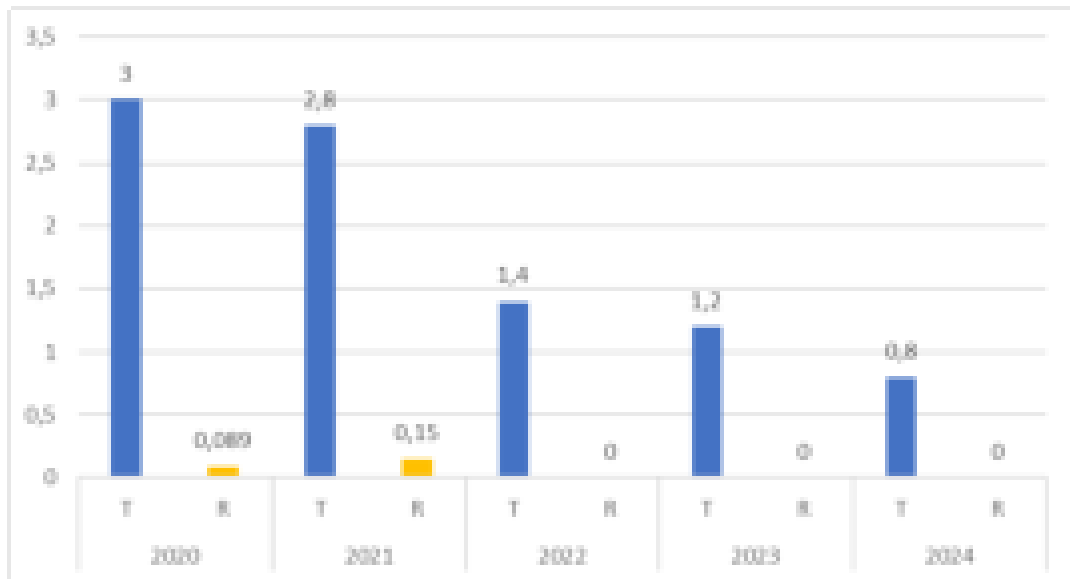
$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Temuan Material Ditjen IKMA + BPIPI + Ditjen ILMATE}}{\text{Realisasi Belanja Ditjen IKMA + BPIPI + Ditjen ILMATE}} \\
 &= \frac{0 + 0 + 0}{602.193.614.234 + 14.156.348.785 + 164.702.438.729} \\
 &= \frac{0}{781.052.401.748} = 0
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 sebesar 200%. Hasil tersebut diperoleh dari Rumus Pengukuran Kinerja:

$$\frac{([0,8-(0-0,8)] \times 100)}{0,8} = 200\%$$

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

N o	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
1	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,089%	<2,8%	0,15%	1,4%	0%	1,2%	0 %	0,8%	0%



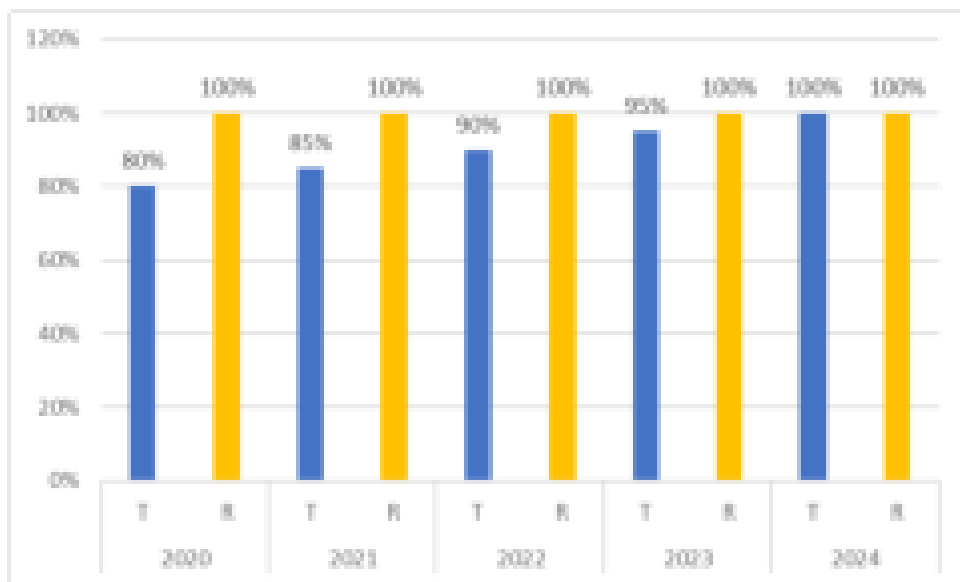
Grafik 2. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Tahun 2020-2024

2. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi kinerja tahun 2024 sesuai cakupan tugas Inspektorat II senilai 100%. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024 adalah sebesar 100%, jumlah pengaduan yang diterima sampai dengan Triwulan IV (Januari – Desember Tahun 2024) sebanyak 16 kali pengaduan, seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Data pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR), semua pengaduan telah selesai ditindaklanjuti dan tidak ada yang berkadar pengawasan, serta telah disampaikan seluruhnya kepada masing-masing unit terkait untuk segera

ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Adapun pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sebagaimana mestinya.

Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
1	Terwujudnya keefektifan dan Efisiensi Pelaksanaan Progm Kementerian Perindustrian	Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada Cakupan tugas Inspektorat II	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%



Grafik 3. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Tahun 2020-2024

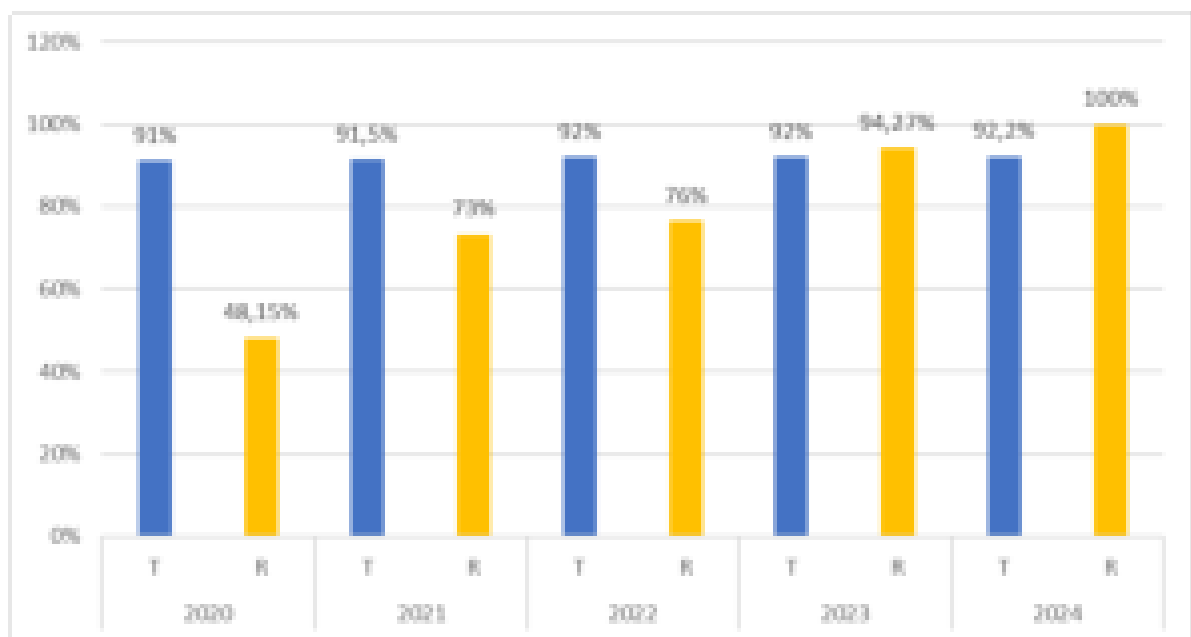
- Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II target 92,2% dengan realisasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 100%. Dari 4 temuan dengan 7 rekomendasi, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan telah sesuai rekomendasi. Indikator Kinerja ini telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I, Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 100%. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Nomor

B/635/IJ-IND.1/PW/IV/2024 pada Triwulan I Inspektorat II telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKU} &= \frac{\text{Rekomendasi Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% \\ &= \frac{SR + BSR}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% = \frac{7 + 0}{7} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

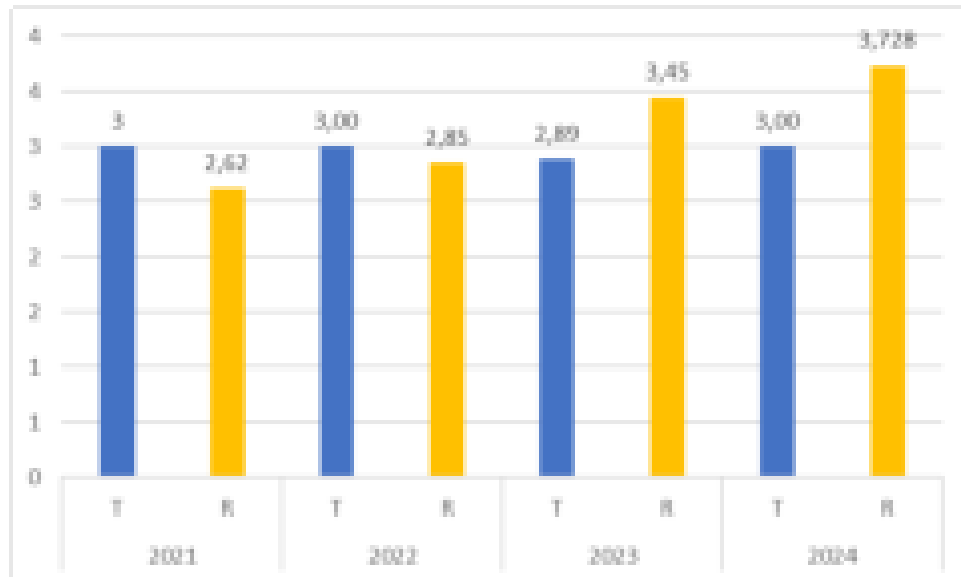
No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II	91%	48,15%	91,5%	73,2%	92%	76,47%	92%	94,27%	92,2%	100%



Grafik 4. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II Tahun 2020-2024

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
2.	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	2,62	Level 3	2,85	Indek 2,89	Indek 3,445	Indek 3	Indek 3,728



Grafik 5. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin Tahun 2020-2024

Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target 3, realisasi tahun 2024 adalah 3,728. Indeks MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 992/IJ-IND.1/PW/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024. Capaian Kinerja tahun 2024 adalah 124,27%. Setelah dilaksanakan Penjaminan Kualitas, secara umum masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan (***area of improvement***) sebagai berikut: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan.

- **PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL**

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

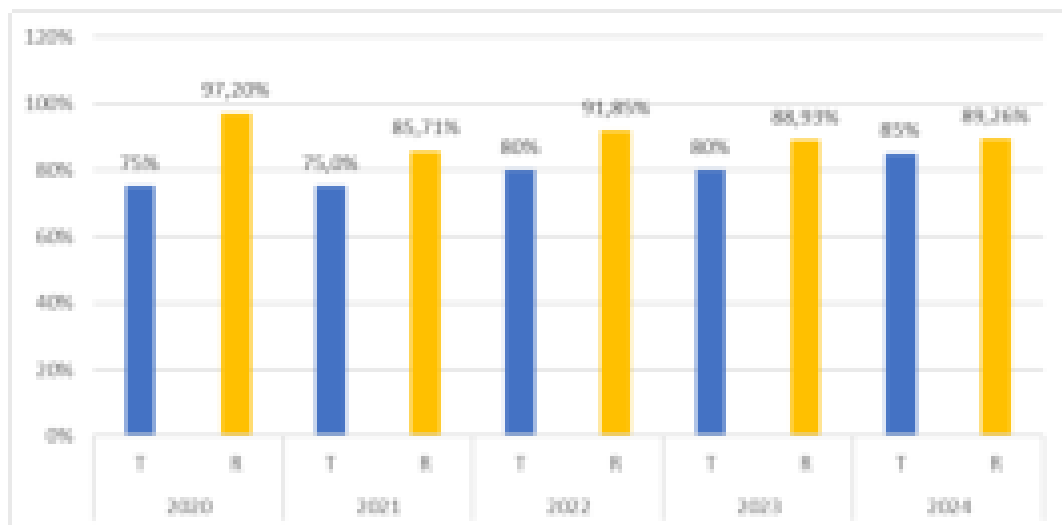
No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%	89,26%
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80%	94,75%

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II dengan target 85%, pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dalam hal ini Satuan Kerja Cakupan tugas Inspektorat II. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Realisasi kinerja tahun 2024 adalah sebesar 89,26%, atau klasifikasi “Sangat Baik”, sehingga capaian kinerja tahun 2024 adalah 105%. Penurunan Tingkat Kepuasan dari 89,93 pada Tahun 2023 menjadi 89,26 pada tahun 2024, hal ini disebabkan Penilaian Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat 1 satker dalam pelaksanaan Audit dan Reviu yang memberikan nilai **cukup** (Nilai 2 dalam survei) dan memberikan nilai terendah yaitu tidak tahu (Nilai 1 dalam Survei) untuk 25 pertanyaan pada kuesioner Survei, pimpinan Inspektorat II melakukan himbauan kepada auditor agar meningkatkan pelayanan terhadap auditi, sehingga pada Triwulan berikutnya bernilai Baik dan Sangat Baik.

Perbandingan Realisasi capaian kinerja tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			2020	2020	2021	2020	2022	2022	2023	2023	2024	2024
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	75%	97,2%	75%	85,71%	80%	91,85%	80%	88,93%	85%	89,26%



Grafik 6. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II Tahun 2020-2024

2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 80%, pengukuran indikator pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada kegiatan audit dengan tahapan sebagai berikut:

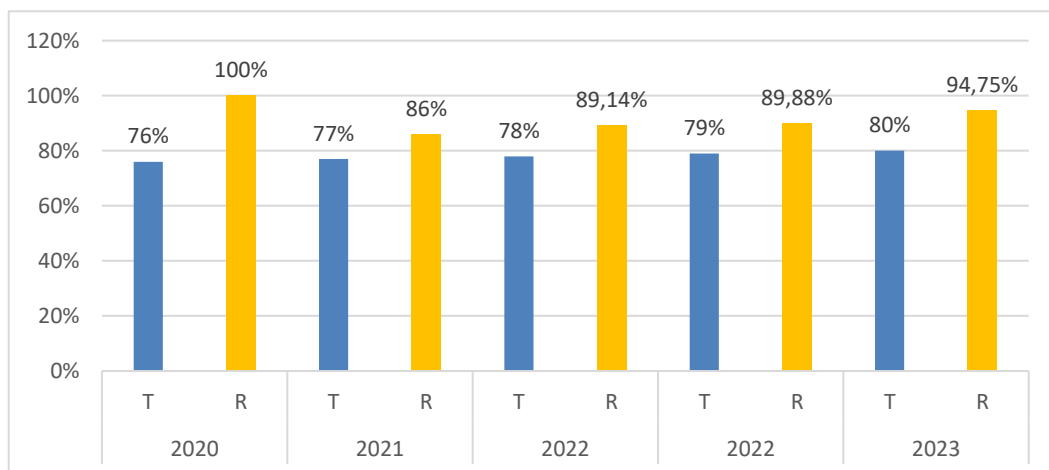
- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (***Risk Based Audit***) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling.
- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS;
- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel, SQL, Access, dll);

- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam, Gdrive, dll)
- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
- Tahap Pelaporan menggunakan Microsoft Office.

Pada Anggaran Tahun 2024 telah dilakukan audit pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo, dan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, realisasi kinerja tahun 2024 (Januari-Desember) sebesar 94,75%. Capaian kinerja dari bulan Januari-Desember tahun 2024 sebesar 118.44%.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	77%	86%	78%	89,14%	79%	89,88%	80%	94,75%

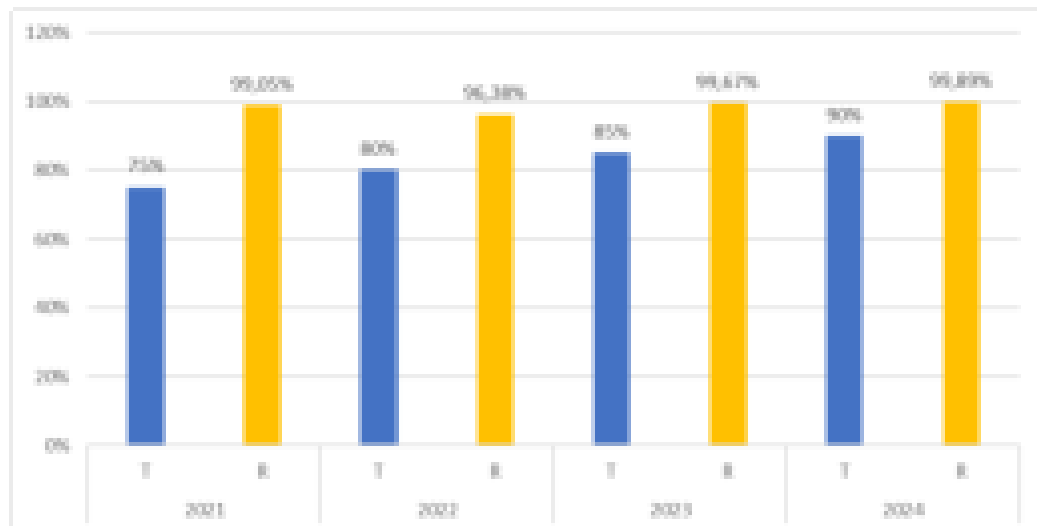


Grafik 7. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) Tahun 2020-2024

4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat II *)IKU	75%	99,05%	80%	96,38 %	85%	99,67%	90%	99,89%

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa dengan target 90%. Indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN Inspektorat II yaitu 521811, 521211, 524114, dan 524119 dengan total nilai sebesar Rp796.490.000,- (Anggaran setelah revisi) dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp795.651.181- sehingga realisasi kinerja sebesar 99,89%. Capaian kinerja tahun 2024 adalah 110,98%. Realisasi ini dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Aplikasi SAKTI.



Grafik 8. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa Tahun 2020-2024

- **PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**

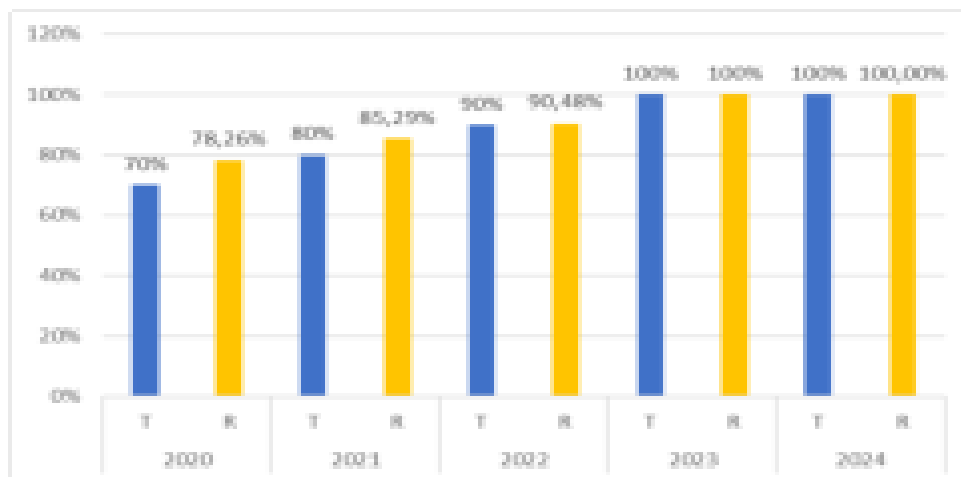
5. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	100%
		b. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 100%. Realisasi kinerja tahun 2024 adalah 100%. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas Inspektorat II mempunyai 52 kegiatan yang ada dalam PKPT adalah sebesar 100%, pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT). Pada Triwulan IV Inspektorat II telah melakukan revisi PKPT untuk optimalisasi pengawasan sesuai dengan Surat Nomor 34/IJ-IND.3/PR/XI/2024 tanggal 4 November 2024

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%	80%	85,29%	90%	90,48%	100%	100%	100%	100%

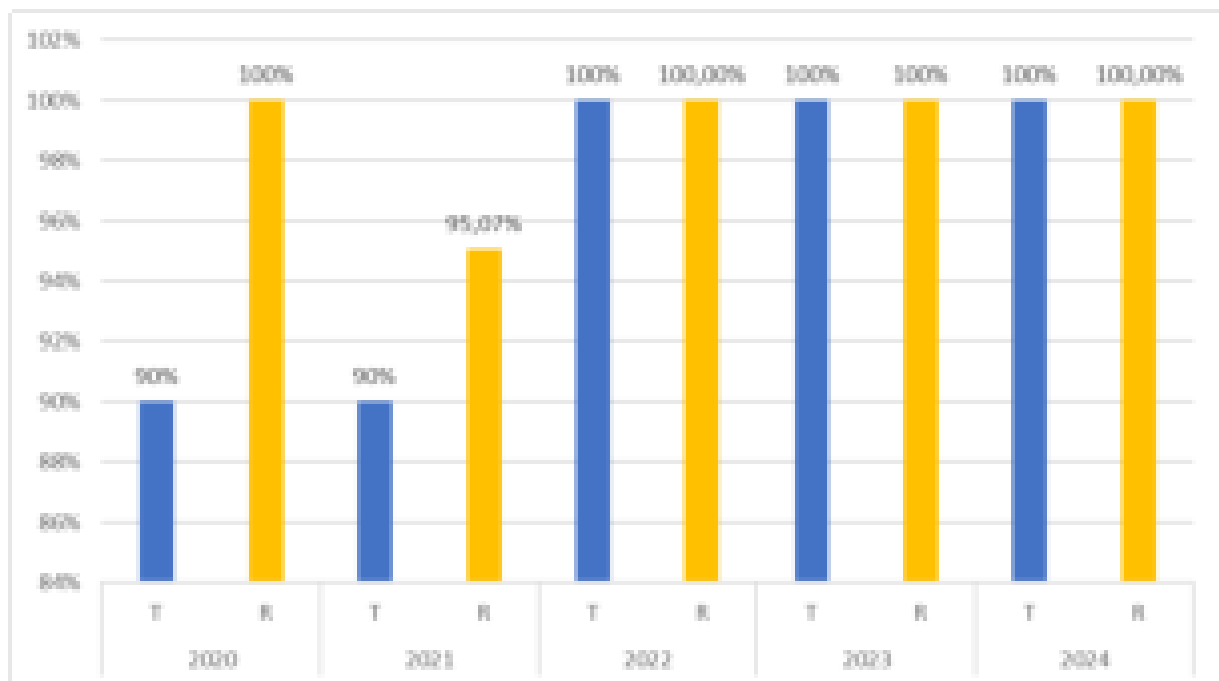


Grafik 9. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT Tahun 2020-2024

2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100%. Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Penugasan yang perannya dinaikkan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang dimiliki sesuai dengan Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2022 Pasal 10 yakni dalam hal suatu unit kerja APIP tidak terdapat Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatan untuk melaksanakan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), Auditor yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan APIP yang bersangkutan. Pada pedoman pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal kondisi tersebut diperbolehkan karena tidak akan mempengaruhi capaian nilai tingkat kesesuaian penugasan SDM. Realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100%. Naik atau turun jenjang jabatan ini disebabkan kurangnya jumlah auditor pertama, sehingga auditor muda diperankan sebagai anggota tim.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022	T 2023	R 2023	T 2024	R 2024
2.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	3. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	100%	90%	95,07%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Grafik 10. Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya Tahun 2020-2024

Tabel 7. Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2024	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8%	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 0.8%, Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah 0 % (Nol Persen) berdasarkan realisasi pada Direktorat Jenderal IKMA, Direktorat Jenderal ILMATE dan BPIPI Sidoarjo senilai Rp 781.052.401.748,- , dan total temuan BPK adalah 0% (Tidak terdapat Temuan Material). Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah 200%. $\begin{aligned} \text{Batas Toleransi Temuan Material Inspektorat II} &= \\ &= \frac{\text{Temuan Material Ditjen IKMA} + \text{BPIPI} + \text{Ditjen ILMATE}}{\text{Realisasi Belanja Ditjen IKMA} + \text{BPIPI} + \text{Ditjen ILMATE}} \\ &= \frac{0 + 0 + 0}{662.193.614.234 + 14.156.348.765 + 164.702.438.729} \\ &= \frac{0}{781.052.401.748} = 0 \end{aligned}$	- Audit Kinerja, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Restrukturisasi pada Ditjen IKMA. - Monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan pada Ditjen IKMA dan ILMATE. - Konsultasi dan Pengawasan Satker Cakupan Tugas Inspektorat II - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2024	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
					Intern atas pelaporan keuangan.
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	100%	Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi kinerja tahun 2024 sesuai cakupan tugas Inspektorat II senilai 100%.	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II*)IKU	92,2%	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti Inspektorat II dengan target 92,2%, realisasi capaian kinerjanya Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 100%. Dari 4 temuan dengan 7 rekomendasi, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 7 Rekomendasi, dan semua telah sesuai rekomendasi. $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Rekomendasi Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$ $= \frac{SR + RSR}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% = \frac{7 + 0}{7} \times 100\% = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$ Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 100%. Berdasarkan Laporan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan Nomor B/635/IJ-IND.1/PW/IV/2024 pada Triwulan I Inspektorat II telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.	Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan.

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2024	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3 Indeks	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target 3,00, realisasi kinerjanya pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,728, berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1992/IJ-IND.1/PW/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, Capaian Kinerja Tahun 2024 Untuk Indeks MRI adalah 124,27%	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,714, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 3,728, Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,996.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II target 85%, dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dalam hal ini audit. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Realisasi capaian kinerjanya pada Tahun 2024 (Januari sd Desember) berdasarkan sampling pelaksanaan Audit Dana Dekonsentrasi, Audit Kinerja Ditjen IKMA, Audit Kinerja Ditjen ILMATE, Audit Kinerja BPIPI Sidoarjo, Reviu pada Ditjen IKMA dan ILMATE, Reviu pada BPIPI Sidoarjo, dan kegiatan pengawalan cakupan tugas Inspektorat II. Klarifikasi Nilai Indeks Sangat Baik dengan nilai 89,26%, capaian kinerja Tahun 2024 adalah 105%.	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat II
		Penerapan Teknik Audit Berbasis	80 %	Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 80%, Pada Tahun 2024 Inspektorat II telah melaksanakan Audit pada Direktorat Jenderal IKMA, Direktorat ILMATE, Tugas Pembantuan Dinas provinsi dan BPIPI Sidoarjo Realisasi penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) pada	Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2024	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
		Komputer (TABK)		Tahun 2024 sebesar 94,75%. Capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 118,44%.	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	90%	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 90%, dengan indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat II yaitu 521811, 521211, 524119, 524114 senilai Rp 796.490.000,- (Anggaran setelah revisi) dan realisasi pemanfaatan anggaran untuk pengadaan PDN tahun 2024 sebesar Rp 795.651.181,- Realisasi capaian kinerjanya 99,89%. Berdasarkan Laporan Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) aplikasi SAKTI.	Berdasarkan Realisasi Akun Belanja barang di Inspektorat II yaitu 521811, 521211, 524119, 524114 dibagi total anggaran.
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 100%. Realisasi kinerja tahun 2024 adalah 100% dengan capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT). Pada Triwulan IV Inspektorat II telah melakukan revisi PKPT untuk optimalisasi pengawasan sesuai dengan Surat Nomor 34/IJ-IND.3/PR/XI/2024 tanggal 4 November 2024.	Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai dengan Perannya	100%	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100%, Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Ada penugasan yang perannya dinaikkan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang dimiliki sesuai dengan Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 10 yang berbunyi Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki sesuai Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 naik atau turun satu tingkat peran diperbolehkan.

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2024	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
				melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1 dan 2), auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Realisasi capaian kinerjanya pada Tahun 2024 sebesar 100% (Dari 1055 penugasan pada 252 kegiatan, yang naik atau turun jenjang jabatannya ada 24 kegiatan). Dan capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100 %. Naik atau turun jenjang jabatan ini disebabkan kurangnya auditor pertama (anggota tim) sehingga auditor ahli diperankan sebagai auditor pertama (anggota tim).	

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1	Terwujudnya keefektifan dan keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II)	1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8%	0,035%	198,75%
		2. Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	5%	0%	200%
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	80%	100%	125%
		4. Rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II)*IKU	80%	48,15%	60,18%
2	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang baik	Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	3,6	IKMA 3.8, ILMATE 3,64	103,33%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal yang efektif	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan Pengawasan.	75%	97,2%	129,6%

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	131,57%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%	111,8%
		2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	125%

Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1,40%	0,0551%	196,07%
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%	0%	200%
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85%	100%	117%

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91,50%	72,3%	80%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	Level 3	2, 62	87,33%
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	85,71%	114 %
		2. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	86 %	111%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	99,05%	132%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	85,29%	106%
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95,07%	105%

Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,3%	0%	200%
		S2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90%	100%	111%
		S3	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	92%	76,47%	83,12%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S4	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI)	Level 3	Level 2	66,67 %

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			Kementerian Perindustrian *IKU			
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	91,85%	114,8%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	89,14%	114,3%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	80%	96,38 %	120,5%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	90,48%	100,5 %

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		L2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	100 %

Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian	Ket
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	1,2%	0%	200%	Tercapai Target
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	95%	100%	105 %	Tercapai Target
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	92%	94,27%	102 %	Tercapai Target
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89 Indeks	3,445 Indeks	119%	Tercapai Target

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian	Ket
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	88,93%	111,16 %	Tercapai Target
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	89,88%	113,77 %	Tercapai Target
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	85%	99,67%	117%	Tercapai Target
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100 %	100 %	Tercapai Target
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai dengan Perannya	100%	100 %	100 %	Tercapai Target

Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian	Ket
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	0,8 %	0%	200%	Tercapai Target
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	100%	100%	100 %	Tercapai Target
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *) IKU	92,2%	100%	108,46 %	Tercapai Target
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3 Indeks	3,728 Indeks	124,27%	Tercapai Target
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%	89,26%	105%	Tercapai Target
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	94,75%	118,44 %	Tercapai Target
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	90%	99,89%	110,98%	Tercapai Target

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Capaian	Ket
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100 %	100 %	Tercapai Target
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai dengan Perannya	100%	100 %	100 %	Tercapai Target

Tabel 8. REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

INSPEKTORAT II TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II													
Stakeholders Perspective													
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II												
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1%	0,035%	0,033%	0%	0%	0%
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat II	Persen	10%	8%	-	-	-	0%	0%	-	-	-
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II											
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	91%	91,5%	92%	92,5%	93%	48,15%	72,3%	76,47%	94,27%	-
	5	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Yang Baik												
	1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Level	3	3	3	4	4	Ditjen IKMA 3,8 dan Ditjen ILMATE 3,640	2,62	2	-	-
	2	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Indek	-	-	-	2,89	3,00	-	-	-	3,445	3,728

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective													
SK3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif												
	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	Persen	75%	75%	80%	80%	85%	97,20%	87,5%	91,85%	88,93%	89,26%
	2	Penerapan Teknik Audit berbasis komputer	Persen	76 %	77 %	78 %	79 %	80 %	-	86%	89,14%	89,88%	95,87%
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
	1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa *)IKU	Persen	-	-	80%	85%	90%	-	99,05%	98,65%	99,67%	99,89%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Learn And Growth Perspective													
SK5	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien												
	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%	78,26%	85,29	90,48%	100	100%
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80%	90%	100%	100%	100%			100%	100	100%

Capaian Kinerja Inspektorat II dibandingkan dengan target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

No	Kategori	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024
6. Peningkatan Kualitas Produktivitas dengan Riset Sektoral II				
		1. Inovativitas/Leakage (%)	92,77 (2018)	100
		2. Primaria (%)	94,12 (2018)	100
		3. Kolaborasi/Inovasi (%)	90,88 (2018)	100
8	Meningkatkan Kualitas Sistem Nasional	1. Global Free Press Index	0,28	0,20
		2. Global Terrorism Index	5,07	4,24
		3. Proporsi orang yang merasa merasa terdampak bencana (%)	51,32 (2017)	100
		4. Indeks Kemudahan dan Ketersediaan Riset	8,47	9,4
		5. Indeks Risiko Persepsi (Perilaku)	39,39 (2018)	37,80
		6. Indeks Risiko Persepsi (target)	34,48 (2018)	34,00
		7. Angka Partisipasi Jalan Bawa Rapor	100	100
		8. Angka Kejadian Serangan	80	80
		9. Angka Korban Pengungsan Internal	10.000 (2018)	14.000
		10. Tumbuhnya Ekonomi Internal Rural (GDP) (%)	68,6	100
		11. Inovasi Industri Perumahan melalui Penelitian Murni (%)	41,9	100
		12. Angka Partisipasi Publik dan Gagasan Masyarakat di Luar	100	100
		13. Angka Partisipasi Persepsi Riset (%)	1,8	1,00
		14. Tingkat Kriminalitas (orang/100.000 Penduduk)	1,3 (2018)	1,1
		15. Pelayanan Publik Persepsi Riset (%)	8,1	100
		16. Riset Global Cyber Security Index	0,77% (2018)	0,800

Grafik 11. RPJMN 2020 – 2024

Dimana capaian kinerja Inspektorat II Tahun 2024 sesuai dengan target yang tertuang di RPJMN 2020 – 2024 adalah :

Target dalam RPJMN untuk sasaran Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori “B” keatas) (%) dengan capaian nilai SAKIP untuk unit binaan Inspektorat II Tahun 2024 yaitu, Direktorat Jenderal ILMATE mendapat nilai 79,95 (BB) dan Direktorat Jenderal IKMA mendapat nilai 82,05 (A);

Analisis Perbandingan “Indeks penerapan MRI” antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan

	2021			2022			2023			2024		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Kementerian Perindustrian	0	3,62	87,9%	0	3,85	99%	2,89	3,405	119,20%	0	3,728	124,27
Kementerian Perdagangan	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	-	Belum Menjadi Target	Belum Menjadi Target	-	0	3,541	118,033%	0	Belum ada Data	Belum ada Data

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko Kementerian Perindustrian yang diperoleh pada tahun 2024 adalah 3,728 dengan capaian 124,27%, maka telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian Kementerian Perindustrian yang lebih baik dibandingkan target dan realisasi yang lebih tinggi di 2024 menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penerapan MRI.

Perbandingan target dan realisasi dengan Kementerian lainnya, yaitu Kementerian Perdagangan, pada tahun 2023 capaian Kementerian Perindustrian di tahun 2023 sebesar 119,20% hal ini lebih tinggi apabila dibanding capaian Kementerian Perdagangan yang hanya sebesar 118,033%

Kementerian Perindustrian menunjukkan kinerja yang lebih baik dari segi pencapaian dan tren peningkatan dalam penerapan MRI. Dengan target yang

lebih rendah dan pencapaian yang lebih tinggi, Kemenperin berhasil menunjukkan pengelolaan risiko yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Kementerian Perdagangan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal cakupan tugas Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2024 (Oktober - Desember) realisasi Anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.139.535.000,- atau sebesar 33,03% dari pagu anggaran sebesar Rp3.450.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 24,76%. Adapun capaian fisik sampai dengan Triwulan IV (Januari - Desember) sebesar 100% dan realisasi anggaran Rp2.975.970.000,- atau sebesar 86,26% dengan sisa anggaran sebesar Rp474.030.000,-

Berdasarkan Aplikasi Sakti Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) sebesar 99,87 % atau Rp2.975.993.447,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp 2.980.000.000,- (Pagu efektif setelah dikurangi Blokir).

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan Anggaran yang digunakan pada aplikasi PP 39 belum dipotong Anggaran Blokir.

Tabel 9. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2024
berdasarkan Aplikasi Sakti

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	3.450.000.000	2.980.000.000	2.975.993.477	99,87%	4.006.523	100%
1842.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]	3.450.000.000	2.980.000.000	2.975.993.477	99,87%	4.006.523	100%
1842.EBD .952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	19.828.000	19.828.000	19.770.050	99,71%	57.950	100%
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	19.828.000	19.828.000	19.770.050	99,71%	57.950	100%
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II	19.828.000	19.828.000	19.770.050	99,71%	57.950	100%
1842.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	97.640.000	97.640.000	97.565.050	99,92%	74.950	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II	97.640.000	97.640.000	97.565.050	99,92%	74.950	100%
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kinerja Inspektorat II Triwulanan dan Tahunan	97.640.000	97.640.000	97.565.050	99,92%	74.950	100%
1842.EBD .965	Layanan Audit Internal	3.332.532.000	2.862.532.000	2.858.658.377	99,86%	3.873.623	100%
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	1.388.793.000	839.521.000	838.385.070	99,86%	1.135.930	100%
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	121.516.000	4.426.000	4.417.700	99,81%	8.300	100%
B	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan	161.496.000	49.537.000	49.535.479	99,99%	1.521	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
	Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo						
C	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi PIKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi	1.016.805.000	784.558.000	783.431.891	99,86%	1.126.109	100%
D	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	88.976.000	1.000.000	1000.000	100%	0	100%
E	Blokir Kebijakan Perjalanan Dinas	58.120.000		-	-	-	0%
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	139.769.000	119.037.000	118.996.711	99,97%	40.289	100%
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara	80.050.000	78.218.000	78.204.711	99,98%	13.289	100%
B	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	31.067.000	22.967.000	22.956.900	99,96%	10.100	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
C	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	8.926.000	8.926.000	8.925.500	99,99%	500	100%
D	Reviu Rencana Kerja Anggaran	19.726.000	8.926.000	8.909.600	99,82%	16.400	100%
053	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	863.222.000	677.931.000	677.429.790	99,93%	501.201	100%
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5.926.000	5.803.000	5.802.600	99,99%	400	100%
B	Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	428.648.000	327.991.000	327.778.884	99,94%	212.116	100%
C	Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Mesin dan Peralatan Pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA	428.648.000	344.137.000	343.848.306	99,92%	288.694	100%
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker	884.254.000	1.218.656.000	1.216.460.606	99,82%	2.195.394	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
	Cakupan Tugas Inspektorat II						
A	Pengawasan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal IKMA	234.492.000	686.134.000	684.573.769	99,77%	1.560.231	100%
B	Pengawasan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal ILMATE	212.532.000	155.056.000	154.883.923	99,89 %	172.077	100%
C	Konsultansi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II	437.230.000	377.466.000	377.002.914	99,88 %	463.086	100%
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	56.494.000	7.387.000	7.386.200	99,99%	800	100%
A	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	56.494.000	7.387.000	7.386.200	99,99%	800	100%

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Aplikasi Sakti TA
2024

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	Realisasi Aplikasi SAKTI		Realisasi PP 39	
				TOTAL	%	TOTAL	%
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	3.450.000.000	2.980.000.000	2.975.993.477	99,87	2.975.970.000	86,26
1842.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	19.828.000	19.828.000	19.770.050	99,71	17.103.633	86,26
1842.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	97.640.000	97.640.000	97.565.050	99,92	84.224.264	86,26
1842.EBD.965	Layanan Audit Internal	3.332.532.000	2.862.532.000	2.858.658.377	99,86	2.874.642.103	86,26
	TOTAL	3.450.000.000	2.980.000.000	2.975.993.477	99,87	2.975.970.000	86,26

Tabel 11. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan TA. 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN								
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	0,8%	0%	-Audit Program dan Kegiatan pada Satker Cakupan Inspektorat II -Audit Dana Dekonsentrasi -Reviu pada cakupan tugas Inspektorat II -Monev SAKIP -Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) -Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Mesin dan Peralatan Pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA -Konsulting dan Pengawasan -Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	2.862.532.000	2.858.658.377	99,86

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	100%	100%	- Tindak lanjut pengaduan masyarakat berkadar pengawasan via SP4N Lapor	-	-	-
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II *) IKU	92,2%	100%	- Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II	-	-	-
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	4. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3 indeks	3,728 indeks	- Penyusunan Peta Risiko	-	-	-
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85%	89,26%	- Penyusunan Dokumen Akuntabilitas	97.640.000	97.565.050	99,92
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	94,75%	- Audit Kinerja dan Dana Dekonsentrasi cakupan tugas Inspektorat II	839.521.000	838.385.070	99,86
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	90%	99,89%	- Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 90 %	796.490.000	795.651.181	99,89

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN								
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100%	100%	- Penyusunan program kerja dan anggaran - Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas	117.468.000	117.335.050	99,88
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	-	-	-	-

Pencapaian Realisasi Keuangan Setiap Triwulan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Keuangan per Triwulan 2024 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Inspektorat II	19.828.000	4.863.800	-	594.000	14.312.250	19.770.050	99,71%
2	Layanan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	97.640.000	15.062.420	-	58.293.910	24.208.720	97.565.050	99,92%
3	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas IT 2	1.017.641.000	9.040.700	8.567.500	669.824.970	150.951.900	838.385.070	82,39%
4	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	119.037.000	79.401.990	3.490.000	33.765.221	2.339.500	118.996.711	99,97%
5	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	914.031.000	5.750.100	1.914.000	398.906.239	270.859.451	677.429.790	74,11%
6	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	1.274.436.000	260.803.703	311.847.627	206.246.192	437.563.084	1.216.460.606	95,45%
7	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	7.387.000	-	7.386.200	-	-	7.386.200	99,99%
	TOTAL	3.450.000.000	374.922.713	333.205.327	1.367.630.532	900.234.905	2.975.993.477	86,26%

Tabel 13. Realisasi Keuangan per Triwulan 2023 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Inspektorat II	15.876.000	2.442.964	3.120.190	5.638.851	4.668.088	15.870.093	99,96%
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	34.404.000	5.294.012	6.761.590	12.046.812	10.115.956	34.218.370	99,46%
3	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	704.321.000	108.379.363	138.423.728	248.090.355	207.094.528	701.987.973	99,67%
4	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	97.512.000	15.004.932	19.164.521	34.608.998	28.671.872	97.450.322	99,94%
5	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	490.745.000	75.514.759	96.448.569	164.155.438	144.295.860	480.414.625	97,89%
6	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	619.741.000	95.364.379	121.800.797	218.641.513	182.225.107	618.031.797	99,72%
7	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	37.401.000	5.755.183	7.350.606	13.268.034	10.997.177	37.371.000	99,92%
	TOTAL	2.000.000.000	307.755.591	393.070.000	696.450.000	588.068.588	1.985.344.179	99,27%

Tabel 14. Realisasi Keuangan per Triwulan 2022 berdasarkan Data Aplikasi PP39

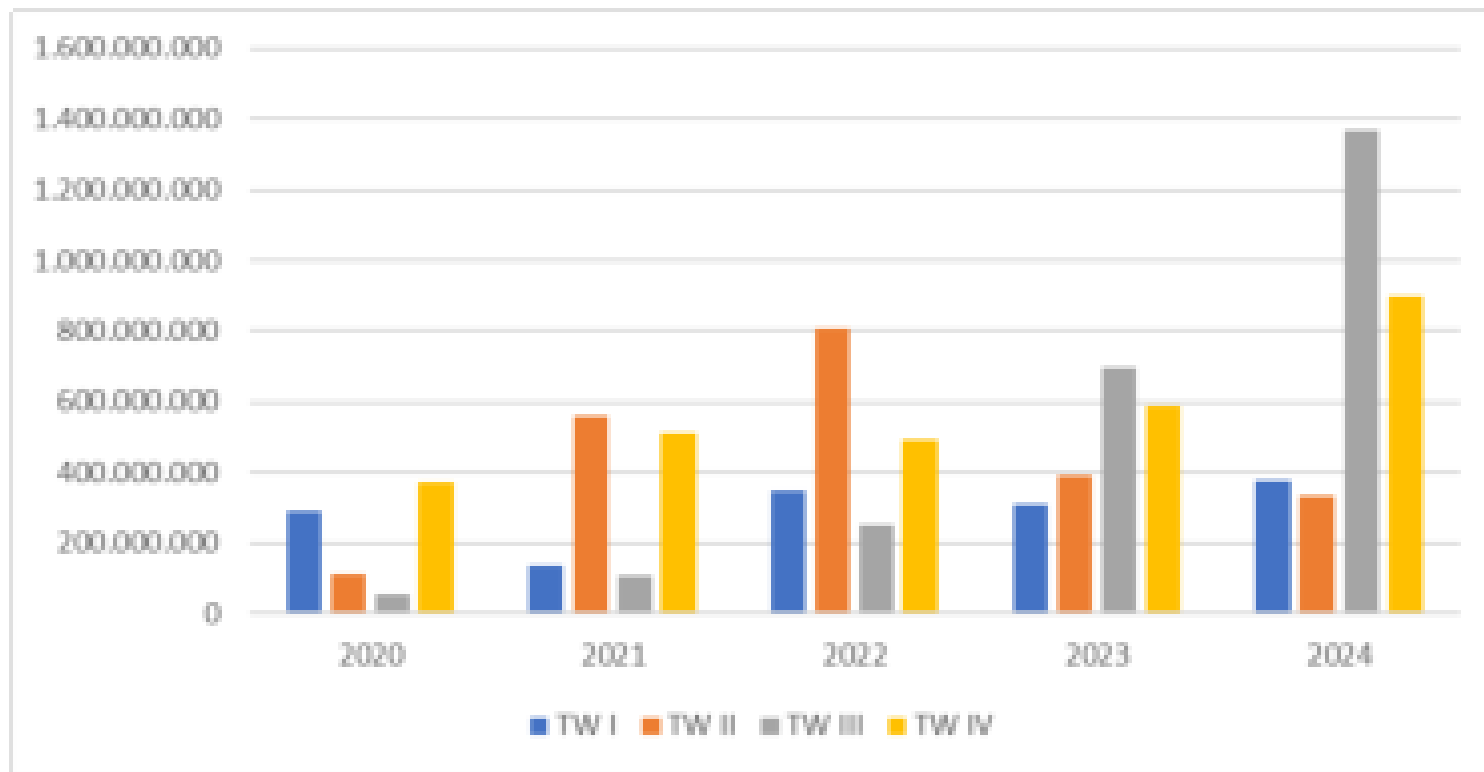
No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Inspektorat II	24.912.000	4.228.300	7.705.700	2.889.792	4.185.216	24.809.861	99,59
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	25.088.000	6.268.000	3.199.000	2.882.611.20	4.244.889.60	24.995.174	99,63
3	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	791.699.000	120.409.912	493.831.905	50.075.871.80	89.949.302.70	790.432.282	99,84
4	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	85.805.000	37.685.333	10.456.200	730.923.60	995.338	84.543.667	98,53
5	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	104.622.000	1.121.034	3.384.500	1.386.600	95.708.719	100.217.414	95,79
6	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	892.874.000	176.154.711	290.500.405	56.011.723.60	108.037.754	873.587.922	97,84
	TOTAL	1.925.000.000	345.867.290	809.077.710	250.305.000	493.377.500	1.898.627.500	98,63

Tabel 15. Realisasi Keuangan per Triwulan 2021 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	846.886.000	58.973.760	397.425.811	220.445.172	153.973.260	843.919.603	99,65
2	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	69.174.000	54.749.642	-	2.389.750	11.575.500	68.714.892	99,34
3	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	6.726.000	3.297.600	1.587.000	-	1.808.000	6.692.600	99,50
4	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	388.660.000	10.821.108	89.743.506	10.195.900	277.607.317	388.368.431	99,92
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	182.712.000	6.538.800	67.351.400	44.191.600	62.316.905	180.778.705	98,94
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	10.842.000	2.460.200	2.162.350	1.560.200	4.633.400	10.816.150	99,76
	TOTAL	1.505.000.000	136.864.000	558.270.067	103.961.000	511.914.382	1.499.290.381	99,62

Tabel 16. Realisasi Keuangan per Triwulan 2020 berdasarkan Data Aplikasi PP39

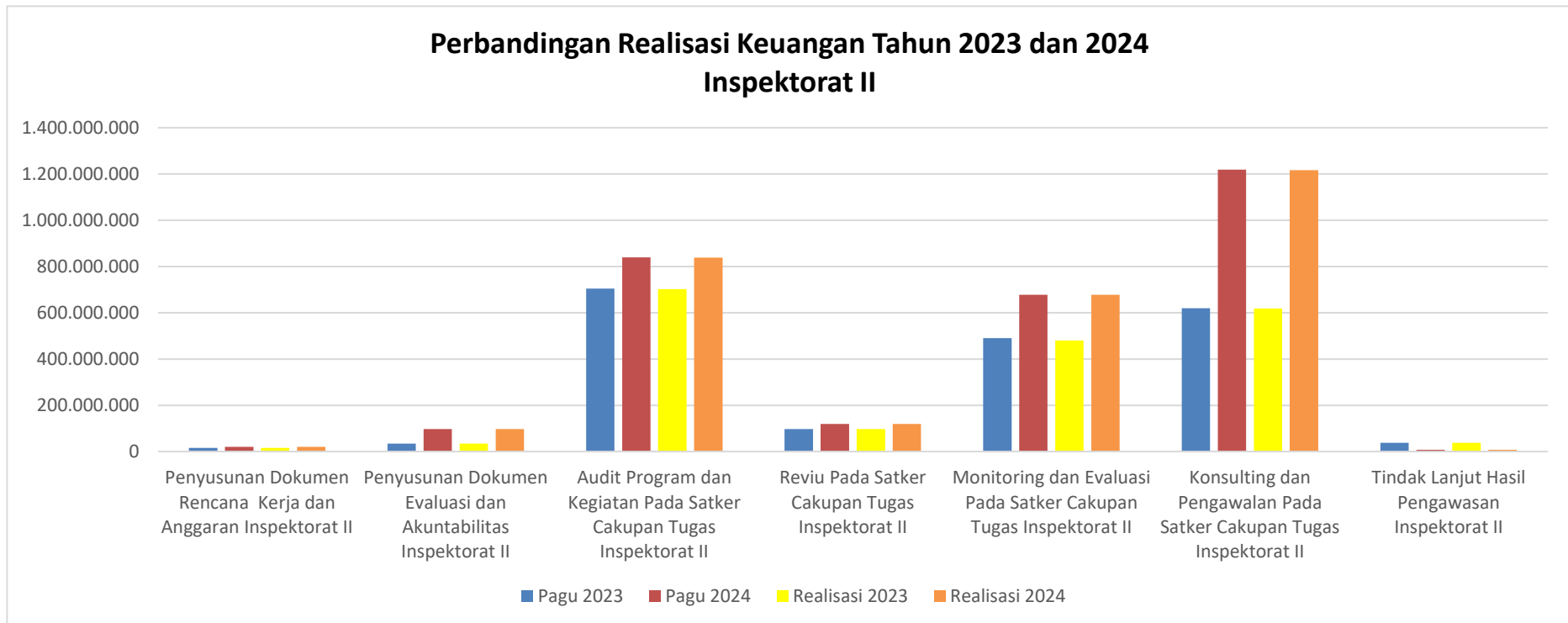
No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	176.218.000	67.111.311	22.943.512	10.067.917	46.437.771	146.560.511	83,17
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	71.745.000	67.721.826	-	-	2.401.737	70.123.563	97,74
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	258.115.000	-	981.661	2.398.338	230.962.610	234.342.609	90,79
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	209.439.000	58.562.066	14.686.182	34.838.401	82.984.551	191.071.200	91,23
5	Layanan Audit Internal	242.875.000	94.662.122	71.657.690	3.464.029	10.988.022	180.771.863	74,43
	TOTAL	958.392.000	288.057.325	110.269.045	50.768.685	373.774.691	822.869.746	85,86



Grafik 12. Perkembangan Realisasi Keuangan Triwulanan Tahun 2020-2024

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2023 dan 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2023	2024	Perbedaan	2023	2024	Perbedaan
1	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II	15.876.000	19.828.000	3.952.000	15.870.093	19.770.050	3.899.957
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II	34.404.000	97.640.000	63.236.000	34.218.370	97.565.050	63.346.680
3	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	704.321.000	839.521.000	135.200.000	701.987.972	838.385.070	136.397.098
4	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	97.512.000	119.037.000	21.525.000	97.450.322	118.996.711	21.546.389
5	Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	490.745.000	677.931.000	187.186.000	480.414.625	677.429.790	197.015.165
6	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	619.741.000	1.218.656.000	598.915.000	618.031.797	1.216.460.606	598.428.809
7	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	37.401.000	7.387.000	-30.014.000	37.371.000	7.386.200	-29.984.800
	Total	2.000.000.000	2.980.000.000	980.000.000	1.985.344.179	2.975.993.477	990.649.298



Grafik 13. Perbandingan Realisasi Keuangan Perkegiatan tahun 2023-2024

Berdasarkan perhitungan **Aplikasi Sakti**, pada realisasi keuangan tahun 2024 terdapat kenaikan/Penurunan anggaran sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi peningkatan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2023) yaitu sekitar 24,89% (Rp 3.952.000,-).
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II
Pada Program/kegiatan ini terjadi Peningkatan Pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2023) yaitu sekitar 183,8%, senilai Rp 63.236.000,-
3. Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi peningkatan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2023) yaitu sekitar 19,2%, senilai Rp 135.200.000,-
4. Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi peningkatan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2023) yaitu sekitar 22,7%, senilai Rp 21.525.000,-
5. Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cakupan tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi peningkatan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2023) yaitu sekitar 38,14%, senilai Rp 187.186.000,-
6. Consulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi peningkatan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2023) yaitu sekitar 30,59%, senilai Rp 598.915.000,-
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2023) yaitu sekitar 80,25%, senilai (Rp 30.014.000,-).

Pada tahun anggaran 2024 terdapat perbedaan antara aplikasi PP39 dan aplikasi SAKTI. Pada Aplikasi PP39 realisasi tercatat sebesar Rp 2.975.970.000,- atau 86,26 % sementara Realisasi Sakti sebesar Rp 2.975.993.477,- atau 99,87%, Perbedaan realisasi ini disebabkan anggaran pada PP39 belum dipotong blokir **Automatic Adjustment** sebesar Rp 350.000.000,- dan kebijakan efisiensi anggaran berupa penghematan perjalanan dinas sebesar Rp 120.000.000,- sehingga anggaran efektif Inspektorat II pada tahun 2024

sebesar Rp 2.980.000.000,-. Terdapat peningkatan realisasi antara tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 0,6 % dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar 99,27% menjadi 99,87% di tahun 2024. Pada Tahun 2024 Inspektorat II telah berhasil dalam melakukan Efisiensi Anggaran dan mencapai target yang ditentukan, hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran Inspektorat II yang berada pada nilai 99,87 % dan pemotongan anggaran sebesar Rp 470.000.000,- , dan mampu memenuhi target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dimana rata rata capaian output sebesar 118,63%. Jumlah ini lebih besar dari nilai penggunaan anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran Inspektorat II telah efektif dan efisien, dan mencapai target yang ditetapkan.

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024				
Sasaran Strategis	Capaian Kinerja / Output	Efektifitas	Serapan Anggaran	Efisiensi
Terwujudnya Keefektifan dan keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	136,16%	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	99,86%	Efisien (Capaian Kinerja > Serapan Anggaran)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Yang Baik	124,27 %	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	-	-
Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	111,99 %	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	99,89%	Efisien (Capaian Kinerja > Serapan Anggaran)

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024				
Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	110,99 %	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	99,89%	Efisien (Capaian Kinerja > Serapan Anggaran)
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	100 %	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	99,88%	Efisien (Capaian Kinerja > Serapan Anggaran)

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat II per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang terdiri atas 17 (Tujuh Belas) orang PNS, dan 2 (dua) Orang PPNP, yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif atau operasional Inspektorat II. Keberadaan PPNP memberikan fleksibilitas dalam operasional Inspektorat II. Secara lengkap dapat dijabarkan susunan SDM Inspektorat II:

Pejabat Struktural

1. Inspektur II : Winky Angga Priatna S.TP, M.S.E
2. Kasubag Tata Usaha : Risniarti, SST., MM

Pejabat Fungsional Auditor :

No	Nama Auditor	Jabatan
1	Drs. Ali Joto Manalu, MM	Auditor Utama
2	Rizki Perdana, SE, MT	Auditor Madya
3	Denny Chandra Arifin, S.Kom. MM	Auditor Madya
4	Tjahyono, SE	Auditor Madya
5	Agung Tri Utomo, SE, M.M.	Auditor Muda

No	Nama Auditor	Jabatan
6	Riko Lesmana Oetarman,SH,M.Kn	Auditor Muda
7	Zita Tessa Rahayani, SE, M.PA	Auditor Muda
8	Dian Novita Sari, S.T , M.T	Auditor Muda
9	Yansen Aditya Sembiring, SH	Auditor Muda
10	Azka Rianto Tedja Ningrat, ST	Auditor Muda
11	Noa Salfhali, ST	Auditor Muda
12	Indra Irwan S.AP	Auditor Muda
13	Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T.	Auditor Pertama
14	Gian Adhi Darmawan, S.Hut	Auditor Pertama

Staf Tata Usaha :

- a) Andy Sebastian Tanasha S.Kom
- b) Ananda Irawadi A.md (PPNPN)

Staf Umum : Muhammadin (PPNPN)

Komposisi Eselon, Fungsional dan Pelaksana

Bagian/ Bidang	Eselon II	Eselon IV	JFA Utama	JFA Madya	JFA Muda	JFA Pertama	Pelaksana	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor			1	3	8	2		14
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1					2	4
Umum							1	1
Jumlah	1	1	1	3	8	2	3	19

Komposisi Pendidikan

Bagian/Bidang	SMU	D3	D4	S1	S2	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor				7	7	14
Pimpinan dan Tata Usaha	1	1		1	2	5
Jumlah	1	1		7	9	19

Komposisi Golongan

Bagian/Bidang	Honorer	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor		10	4	14
Pimpinan dan Tata Usaha	2	1	2	5
Jumlah	2	11	6	19

Komposisi Jenis Kelamin

Bagian/Bidang	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
Kelompok Jabatan fungsional Auditor	3	11	14
Pimpinan dan Tata Usaha	2	3	5
Jumlah	5	14	19

Secara garis besar 53% (9 orang) dari 17 (Tujuh Belas) PNS Inspektorat II tingkat pendidikannya S2 dan sisanya S1. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat II dapat memaksimalkan capaian kinerja dengan realisasi capaian fisik tahun 2024 sebesar 100%.

Analisa Kompetensi dan Tugas

Kompetensi dan tugas masing-masing pegawai di Inspektorat II Kementerian Perindustrian sangat bergantung pada jabatan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya sebagai APIP pada Kementerian Perindustrian, dengan mengedepankan kompetensi yang sesuai. Berikut adalah jabaran lebih lengkap mengenai kompetensi dan tugas pegawai di berbagai level di Inspektorat II:

1. Inspektur II (Winky Angga Priatna)

Sebagai Inspektur II, Winky Angga Priatna memegang tanggung jawab strategis yang sangat besar dalam organisasi. Dengan latar belakang pendidikan S.TP (Sarjana Teknologi Pertanian) dan M.S.E (Magister Ekonomi)

2. Kepala Subbagian Tata Usaha – Risniarti - (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023) tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Manajemen Industri (S.S.T) dan Magister Manajemen (MM). Di Subbagian Ketatausahaan Inspektorat II mempunyai staf sebagai berikut:

- Andy Sebastian Tanasha.,S.Kom
- Ananda Irawadi, A.Md
- Muhammadin

3. Inspektorat II mempunyai satu orang Auditor Utama, tugas dari Auditor Utama (Permenpan RB No 48 tahun 2022) dijabarkan sebagai berikut

- Merumuskan konsep rencana strategis Pengawasan Intern, tema pengawasan tahunan, atau konsep kebijakan Pengawasan Intern;
- Mereviu konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern;
- mengendalikan mutu penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
- memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan yang bersifat strategis nasional;

- mengendalikan mutu pelaksanaan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
 - Mengevaluasi sistem/desain Pengawasan Intern;
 - menyusun rekomendasi evaluasi hasil Pengawasan Intern;
 - mengendalikan mutu penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern;
 - mengevaluasi penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau penjaminan kualitas Pengawasan Intern.
4. Inspektorat II memiliki 3 Orang Auditor Madya, tugas dan tanggung jawab Auditor Madya (Permenpan RB No 48 tahun 2022) :
- mereviu hasil analisis data, bahan, dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan Intern;
 - menyusun rencana pengawasan tahunan;
 - memantau pelaksanaan rencana pengawasan tahunan;
 - menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern;
 - mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 - mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 - memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi;
 - mereviu hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 - mereviu dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;

- melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral;
 - mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern;
 - mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern;
 - mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;
5. Auditor Muda Inspektorat II sebanyak 8 orang, mereka memiliki kompetensi teknis yang baik, dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, teknik, dan manajemen. Tugas dan tanggung Jawab Auditor Muda (Permenpan RB No 48 tahun 2022):
- menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 - menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 - mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 - menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 - menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;

- melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi.
 - menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;
 - menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern;
 - menganalisis data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;
6. Auditor Pertama Inspektorat II sebanyak 2 orang, tugas dan tanggung jawab Auditor Pertama(Permenpan RB No 48 tahun 2022):
- mengidentifikasi data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern.
 - mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 - mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas rendah;
 - mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 - mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;

- melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang;
- mengumpulkan dan mengidentifikasi data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Inspektorat II. Terlihat bahwa alokasi Sumber Daya Manusia dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat II secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM tersebut Inspektorat II dapat memaksimalkan capaian kinerja mencapai lebih dari 99% sehingga masih dalam kategori sangat baik dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi meskipun masih belum ideal dan optimal.

BAB IV

PENUTUP

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2024, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari terealisasinya seluruh kegiatan yang telah direncanakan;
2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai target secara keseluruhan. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II tahun 2024 seluruhnya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektoprta II Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Adanya blokir / pemotongan anggaran dengan total sebesar Rp 470.000.000,- blokir pertama dilakukan pada Bulan Januari 2024 sebesar Rp 350.000.000,- dalam rangka ***Automatic Adjustment***, Blokir kedua dilakukan pada Bulan November 2024 sebesar Rp 120.000.000,- dalam rangka Efisiensi anggaran penghematan perjalanan dinas, setiap bulan dilakukan revisi POK, dikarenakan penginputan data anggaran sampai detil Akun pada Aplikasi Sakti;
2. Belum terdapat pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat II;
3. Belum terdapat pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (program prioritas kegiatan berisiko tinggi).

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan melakukan revisi Anggaran dan Revisi PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun anggaran 2024. Surat Revisi PKPT dengan Nomor 34/IJ-IND.3/PR/XI/2024, pada tanggal 4 November 2024;
2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal;
3. Penyusunan pedoman audit kinerja di lingkungan Inspektorat II;
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi (program prioritas kegiatan berisiko tinggi);
5. Berkoordinasi dengan Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan untuk segera mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024;
6. Berkoordinasi dengan bagian Program dan Anggaran untuk melakukan Revisi anggaran, menyesuaikan dengan Aplikasi Sakti;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat II Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja yang menggambarkan capaian, permasalahan, dan hasil evaluasi. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, dan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Februari 2025

Inspektur II, 

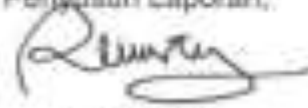
Winky Angga Priatna



LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat II Tahun 2024, telah direviu secara berjenjang oleh Auditor Utama dan Auditor Madya Inspektorat II.

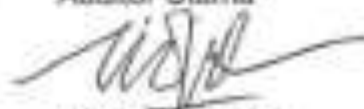
Penyusun Laporan,



(Rizniarti)

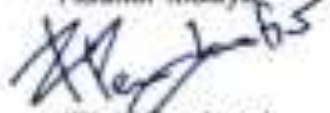
Tim Reviu,

1. Auditor Utama



(Ali Joto Manalu)

2. Auditor Madya



(Rizki Perdana)

REALISASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2024																	
Unit Organisasi : Inspektorat II																	
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung Jawab	Pelaksana				
				Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara			Realisasi			
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN																	
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	0,80%	- Audit Kinerja ILMATE - Revu LKBMN - Evaluasi SAKIP - Revu LAKIP - Audit Dekonsentrasi - Revu RKAKL - Audit Tujuan Tertentu - Audit Kinerja IKMA	25%	Belum Dilaksanakan Pengukuran, BPK Sedang melaksanakan Pemeriksaan	- Audit Dekonsentrasi - Revu RKAKL - Revu PAPBJ	25%	Belum Dapat Diukur dikarenakan BPK Masih melakukan Proses Pemeriksaan	- Revu RKBMN - Audit Tujuan Tertentu	25%	Belum dapat diukur dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan masih melakukan proses pemeriksaan.	- Audit Kinerja IKMA - Revu RKAKL - Revu RKBMN	25%	0%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	100%	-Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat - Pelaksanaan Audit Khusus sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	100%	-Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat - Pelaksanaan Audit Khusus sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	100%	-Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat - Pelaksanaan Audit Khusus sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	100%	- Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat - Pelaksanaan Audit Khusus sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II	92,2%	-Audit Kinerja pada Ditjen ILMATE - Audit Kinerja BPPI Sidoarjo, Audit Dana Dekonsentrasi, Audit Kinerja Ditjen IKMA, dan Audit Dengan Tujuan Tertentu	25%	100%	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	25%	100%	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	25%	100%	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	25%	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MR) Cakupan Tugas Inspektorat II	3 Indeks		25%	Belum dapat diukur sehubungan Mutufitas SPIP dilaksanakan pada TW III dan IV	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	25%	Belum dapat diukur dikarenakan kegiatan penilaian mutufitas SPIP baru dilaksanakan pada TW III dan IV	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	25%	Belum dapat diukur dikarenakan kegiatan penilaian mutufitas SPIP baru dilaksanakan pada Triwulan IV.	Konsultasi penyusunan peta risiko satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	25%	3,728	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE																	
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan	85%		25%	86,25%	Pelaksanaan Survey dalam Pelaksanaan Audit Kinerja ILMATE	25%	89,57%	Pelaksanaan Survey dalam Pelaksanaan Kegiatan Audit, Revu dan Move	25%	91,50%	Pelaksanaan Survey dalam Pelaksanaan Audit : Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan, Dit. IKM PFBB, IKM LMEA, Selditjen IKMA, Ditjen IKMA	25%	89,73%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	-Audit Kinerja pada Ditjen ILMATE - Audit Kinerja BPPI Sidoarjo - Audit Dana Dekonsentrasi - Audit Kinerja Ditjen IKMA - Audit Dengan Tujuan Tertentu	25%	93,25%	Pelaksanaan Kegiatan Audit Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	25%	95,5%	Pelaksanaan Kegiatan Audit Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	25%	95,50%	Pelaksanaan Kegiatan Audit Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	25%	94,75%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa dalam Negeri	Persentase nilai capaian Penggunaan Produk dalam negeridalam engadaan barang dan jasa di Inspektorat II	90%		25%	12,53%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II	25%	17,28%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II	25%	43,20%	Penggunaan PDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II	25%	99,89%	inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE																	
5	Terwujudnya sistem Pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	- Audit Kinerja ILMATE - Revu - Evaluasi SAKIP - Audit Dekonsentrasi - Audit Tujuan Tertentu - Audit Kinerja IKMA - Move	30%	100%	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II	30%	100%	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II - Pelaksanaan Move	20%	100%	-Penyusunan Program Kerja dan Anggaran -Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya Cakupan Inspektorat II - Pelaksanaan Move	20%	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	-Audit Kinerja ILMATE - Revu - Evaluasi SAKIP - Audit Dekonsentrasi - Audit Tujuan Tertentu - Audit Kinerja IKMA - Move - Pengawasan	25%	100%	- Penyusunan PKPT dan Anggaran Inspektorat II	25%	100%	- Penyusunan PKPT dan Anggaran Inspektorat II	25%	100%	- Penyusunan PKPT dan Anggaran Inspektorat II	25%	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektorat II



Jakarta, Januari 2025
Inspektur II,

Winky Angga Priatna

Page 100 of 100

[illegible][illegible]

NOTA DINAS
NOMOR : 5035/JI-IND.MP/PT/2024

Yth : (Pt. Inspektur I)
Dari : Sekretaris Inspektori Jenderal
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Cakupan Inspektori I
Lampiran : -
Tanggal : 2 April 2024

Gebutungan dengan pelaksanaan Penertarikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Periode Triwulan I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Cakupan Inspektori I, dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Saldo Terwujud Tahun Sebelumnya

Hingga Triwulan I Tahun 2024, pada Satuan Kerja Cakupan Inspektori I masih terdapat 58 (delapan puluh delapan) rekomendasi belum selesai dan 172 (seratus tujuh puluh dua) rekomendasi belum dilaksanakan pada penertarikan Tahun Anggaran (T.A.) 2017 sampai dengan 2023 dengan total temuan material yang belum terselesaikan ini kali sebesar Rp8.050.000,- sebagaimana rincian tabel dibawah ini :

No	Satuan Kerja	T.A.	Temuan						Status Rekomendasi			
			Tercatat		Tindak Lanjut		Saldo Terwujud		DR	SMP	B	SPK
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)				
1	DA Industri/Agribisnis	2018	15	0	0	0	0	0	74	1	0	0
2	DA Industri	2020	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DA IPT	2020	15	1.700.000	11	1.700.000	4	0	17	0	0	0
4	DA-DAK KEMEN	2021	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022	15	18.000.000	10	18.000.000	5	0	50	0	0	0
5	DA-DAK-DAK	2020	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	15	1.700.000	0	0	0	0	14	0	0	0
		2022	15	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DAK	2022	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Inspeksi/ Pengawasan/ Diklat	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Inspeksi/ Pengawasan/ Diklat	2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Inspeksi/ Pengawasan/ Diklat	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Inspeksi/ Pengawasan/ Diklat	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pengawasan	2020	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengawasan	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pengawasan	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pengawasan	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pengawasan	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pengawasan	2020	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pengawasan	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			100	19.700.000	40	19.700.000	60	0	100	0	0	0

Legenda :
DA = Direktorat
IPT = Industri
DAK = Direktorat
DAK-DAK = Direktorat
DAK-DAK-DAK = Direktorat
DAK-DAK-DAK-DAK = Direktorat

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) "Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti dan Selesai" pada Inspektori I, yakni untuk penertarikan yang dilakukan tahun 2023 (T-1) adalah 100%, dihitung dari jumlah rekomendasi ditindaklanjuti (Selesai Rekomendasi-Belum Selesai Rekomendasi) dibagi dengan seluruh rekomendasi hasil pengawasan tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKU} &= \frac{\text{Rekomendasi Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\% \\ &= \frac{58 + 172}{100} \times 100\% = \frac{230}{100} \times 100\% = 230\% = 100\% \end{aligned}$$

3. Hasil Pengawasan Tahun 2024

Berdasarkan hasil penertarikan surat Analisis Hasil Pengawasan (AHP) yang disampaikan kepada Unit Kerja, Sekretaris Inspektori Jenderal belum menerima AHP Inspektori I pada Triwulan I Tahun 2024. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektori I Triwulan I Tahun 2024, audit dilaksanakan terhadap Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/DAK Direktorat Jenderal Industri, Logika, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (DITJEN ILMATE), namun hingga saat ini audit masih dalam proses sehingga AHP dapat diterima pada Triwulan II Tahun 2024.

4. Belum ada Surat Keterangan Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal untuk Satuan Kerja Dinas Inspektorat II pada Triwulan I Tahun 2024.
5. Apabila terdapat Satuan Kerja Dinas Saudara yang telah menyampaikan tindak lanjut secara langsung kepada Auditor yang melakukan pengawasan, kami mohon untuk dapat menginformasikan kepada Sekretnas Inspektorat Jenderal agar dapat dilakukan pemutakhiran data dan status tindak lanjut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretnas Inspektorat Jenderal (



Endang Sutrisno

Tertutup
Inspektorat Jenderal

NOTA DINAS
KORPORASI SALING-SINERGI

Yth,
Dan
Hh

Lampiran
Tanggal

Inspektur Jenderal
Inspektur II
Laporan Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Pengakuan
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
melalui SP4N LAPOR Tahun 2024
0 (sembilan) halaman
2 Januari 2025

Berkenaan dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Road Map-Solusi Pengakuan Pelayanan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2023-2024 dan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tim Pengabdian dan Pemantauan Tindak Lanjut Pengakuan Pelayanan Publik melalui SP4N LAPOR di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, berikut kami sampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut tahun 2024, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengakuan SP4N LAPOR www.lapor.go.id, diperoleh jumlah pengakuan masyarakat ke Kementerian Perindustrian di tahun 2024 sebanyak 151 (seratus satu) laporan pengakuan, namun hanya 70 (tujuh puluh sembilan) laporan pengakuan yang didistribusikan ke unit kerja dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tindakan I sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan pengakuan. Namun terdapat 2 (dua) laporan pengakuan yang dianggap baik oleh Pelapor maupun Admisi Nasional SP4N LAPOR karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian dan 1 (satu) laporan pengakuan yang sudah ditangani sehingga tidak layak lagi laporan pengakuannya, sehingga total sebanyak 20 (dua puluh) laporan pengakuan yang didistribusikan ke unit kerja.
 - b. Tindakan II sebanyak 23 (dua puluh tiga) laporan pengakuan. Namun terdapat 5 (lima) laporan pengakuan yang dianggap baik oleh Pelapor maupun Admisi Nasional SP4N LAPOR karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian dan 4 (empat) laporan pengakuan yang sudah ditangani sehingga tidak layak lagi laporan pengakuannya, sehingga total sebanyak 14 (empat belas) laporan pengakuan yang didistribusikan ke unit kerja.
 - c. Tindakan III sebanyak 34 (tiga puluh empat) laporan pengakuan. Namun terdapat 5 (lima) laporan pengakuan yang dianggap baik oleh Pelapor maupun Admisi Nasional SP4N LAPOR karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian dan 2 (dua) laporan pengakuan yang sudah ditangani sehingga tidak layak lagi laporan pengakuannya, sehingga total sebanyak 27 (dua puluh tujuh) laporan pengakuan yang didistribusikan ke unit kerja.
 - d. Tindakan IV sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan pengakuan. Namun terdapat 3 (tiga) laporan pengakuan yang dianggap baik oleh Pelapor maupun Admisi Nasional SP4N LAPOR karena tidak relevan dengan kinerja Kementerian Perindustrian, sehingga total sebanyak 18 (delapan belas) laporan pengakuan yang didistribusikan ke unit kerja.

2. Jenis laporan pengakuan yang didistribusikan ke unit kerja dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Pengakuan tidak berkaitan pemrosesan	20 (dua puluh enam) laporan
b. Pembiayaan informal	41 (empat puluh satu) laporan
c. Asuransi	12 (dua belas) laporan

3. Dampak Tindak Lanjut oleh Tim Pengabdian dan Pemantauan laporan pengakuan berdasarkan unit kerja dan indikator terdapatnya sebagai berikut:

Unit Kerja	Sebelum TL	Proses	Sesudah	Total	%TL*	RTL**
Selatan	1	1	16	18	94,4	2,1
Pusat	0	1	16	17	100	0,9
Direktori KAMITE	0	2	10	12	100	0,4
INDUK	0	0	6	6	100	4
Direktori KPM	0	0	6	6	100	0,4
PPHOC	0	0	6	6	100	4,2
Direktori KPT	1	0	4	5	80	4
BTICOR	0	0	3	3	100	6
Direktori KMA	0	0	3	3	100	0,8
WVIRATOR	0	0	7	7	100	0,7

*) Persentase Tindak Lanjut sesuai jumlah laporan pengakuan yang didistribusikan dibandingkan dengan total laporan pengakuan yang terdistribusi ke unit kerja.
**) Indikator Tindak Lanjut adalah rata-rata jumlah hari unit kerja memproses laporan pengakuan yang terdistribusi.

- a. Terdapat 2 (dua) laporan pengakuan yang belum diselesaikan, yaitu 1 (satu) laporan baru masuk pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2024 dan diselesaikan ke Direktorat Jenderal tanggal 30 Desember 2024. Sementara 1 (satu) laporan lainnya masuk ke Admisi Nasional SP4N LAPOR tanggal 20 Desember 2024, namun baru diselesaikan ke Kementerian Perindustrian tanggal 27 Desember 2024 dan terdistribusi ke Direksi KPT tanggal 30 Desember 2024.
- b. Asesmen Monev Inspeksi Tim Verifikasi Tim Pengabdian SP4N LAPOR dan Direktorat Inspektur Jenderal yang telah melakukan verifikasi terhadap laporan pengakuan dengan rata-rata verifikasi tidak sampai 1 hari (0,7) dan unit kerja Pusat yang telah memproses laporan pengakuan dengan rata-rata tidak lebih dari 1 hari (0,9).
- c. Petugas pengabdian masyarakat tidak lagi laporan pengakuan pada unit kerja Direksi KPM dan BTICOR dengan rata-rata tidak lebih dari 1 hari di tahun 2024.

4. Peringkat pengujian adalah dalam rangka uji coba pengujian yang terdapat.
5. Seluruh laporan pengujian di atas telah diselesaikan dengan Penguji dan Admin Unit Kerja yang bersangkutan. Apabila terdapat kecurigaan Tika Verifikasi dan Admin Unit Kerja yang telah melakukan verifikasi dan tidak terdapat atau laporan pengujian yang diterima Kementerian Pendidikan di tahun 2024.

Dengan ini, saya sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Inspektur Jenderal saya harap kami sampaikan terima kasih.

Inspektur II,



Widy Arga Prama

Terbilang:

1. Salinan Inspektur Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur III

NOTA DINAS
NOMOR 151/HU-IND/SP44/K0204

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Kas : Laporan Triwulan II (Tiga) Tahun 2024 Regulasi Pemantauan
Tindak Lanjut Pengawasan Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian Perindustrian melalui SP44-LAPORI
Lampiran : 4 (empat) halaman
Tanggal : 3 Oktober 2024

Berkenaan dengan arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem
Pengukuran Pengawasan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat
Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 42 Tahun 2024
tentang Tim Pengusaha dan Pemantauan Tindak Lanjut Pengawasan Pelayanan Publik
melalui SP44-LAPORI di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, berikut
kami sampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjutnya untuk periode 1 Juli s.d. 30
September 2024, sebagai berikut:

1. Berdasarkan kanal pengaduan SP44-LAPORI www.lapor.go.id, diperoleh
pengaduan masyarakat sebanyak 23 (tiga puluh tiga) laporan pengaduan dengan
dimasukkan Juli sebanyak 12 laporan pengaduan, Agustus sebanyak 11 laporan
pengaduan, dan September sebanyak 11 laporan pengaduan. Namun terdapat 5
laporan pengaduan yang dianggap baik oleh Pelapor reason Admisi SP44 Lapor
Nasional karena tidak relevan dengan tugas Kementerian Perindustrian dan 2
laporan pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi tidak lengkap laporan
pengaduannya, sehingga total sebanyak 24 laporan pengaduan yang
dikirimkan ke unit kerja di periode 1 Juli s.d. 30 September 2024.
2. Lima laporan pengaduan yang dikotifikasi ke unit kerja dapat diklasifikasi
sebagai berikut:
 - a. Pengaduan tidak berkaitan pengawasan : 7 laporan;
 - b. Pemintaan informasi : 10 laporan;
 - c. Aspirasi : 3 laporan.
3. Status Tindak Lanjut atas 20 laporan pengaduan berdasarkan unit kerja sebagai
berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebanyak 3 laporan pengaduan selesai tindak lanjutnya
dan 1 laporan pengaduan tanggal 10 September belum ditindaklanjuti;
 - b. Direktorat Jenderal KPT sebanyak 2 laporan pengaduan selesai tindak
lanjutnya;
 - c. Direktorat Jenderal LMATE sebanyak 1 laporan pengaduan selesai tindak
lanjutnya;

- d. Direktorat Jenderal IPMA sebanyak 2 laporan pengaduan selesai tindak
lanjutnya;
 - e. Direktorat Jenderal KPTB sebanyak 1 laporan pengaduan selesai tindak
lanjutnya;
 - f. PPTPPN sebanyak 2 laporan pengaduan selesai tindak lanjutnya;
 - g. Pusdatin sebanyak 10 laporan pengaduan selesai tindak lanjutnya;
 - h. Politeknik APP Jakarta sebanyak 1 laporan pengaduan selesai tindak lanjutnya
dan 1 laporan pengaduan tanggal 27 September belum ditindaklanjuti.
4. Seluruh laporan pengaduan di atas telah dikomunikasikan dengan pimpinan dan
adviser unit kerja yang bersangkutan, namun masih terdapat 2 laporan pengaduan
yang belum ditindaklanjuti pada unit kerja Sekretariat Jenderal dan Politeknik APP
Jakarta dengan alasan sebagai berikut:

Diketahui kami laporkan, atas perhatian dan arahan Bapak Inspektur Jenderal
mohon dapat kami sampaikan terima kasih.

Inspektur I

Willy Angga Priatna

- Tersisaan:
1. Sekretaris Inspektur Jenderal;
 2. Inspektur I;
 3. Inspektur II;
 4. Inspektur IV.

NOTA DINAS
NOMOR: TALLIND.SP4M/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dit. : Dit. Inspektur II
Hal : Laporan Tahunan II (Dua) Tahun 2024 Kegiatan
Pemeriksaan Tidak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik
di Lingkungan Kementerian Perindustrian melalui SP4M-
LAPOR
Lampiran : 5 (lima) halaman
Tanggal : 4 Juli 2024

Berikutan dengan mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Road Map
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024
dan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 42
Tahun 2024 tentang Tim Pengelola dan Pemantauan Tidak Lanjut Pengaduan
Pelayanan Publik melalui SP4M-LAPOR di Lingkungan Kementerian
Perindustrian Tahun 2024, berikut kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan
tidak lanjutnya untuk periode 1 April s.d. 30 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Berdasarkan kanal pengaduan SP4M-LAPOR www.lapor.go.id, diperoleh
pengaduan masyarakat sebanyak 22 (dua puluh dua) laporan pengaduan
dengan rincian: April sebanyak 6 laporan pengaduan, Mei sebanyak 8
laporan pengaduan, dan Juni sebanyak 8 laporan pengaduan. Namun
terdapat 5 laporan pengaduan yang diampikan oleh Admin SP4M Lapor
Nasional karena tidak relevan dengan kewenangan Kementerian Perindustrian
dan 4 laporan pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi tidak lengkap
laporan pengaduannya, sehingga total sebanyak 13 laporan pengaduan
yang ditransmisikan ke unit kerja di periode 1 April s.d. 30 Juni 2024.
2. Jenis laporan pengaduan yang ditransmisikan ke unit kerja dapat
diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Pengaduan tidak berkaitan pengawasan: 3 laporan;
 - b. Permintaan informasi: 8 laporan;
 - c. Aspirasi: 4 laporan.
3. Status Tidak Lanjut atas 13 laporan pengaduan berdasarkan unit kerja
sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebanyak 4 laporan pengaduan selesai tidak
lanjutnya;
 - b. Direktorat Jenderal SP4M sebanyak 1 laporan pengaduan selesai tidak
lanjutnya;

- c. Direktorat Jenderal LAMATE sebanyak 2 laporan pengaduan selesai
tidak lanjutnya;
 - d. BDKU sebanyak 1 laporan pengaduan selesai tidak lanjutnya;
 - e. PPTPPOR sebanyak 1 laporan pengaduan selesai tidak lanjutnya;
 - f. Pusdatin sebanyak 4 laporan pengaduan selesai tidak lanjutnya.
4. Seluruh laporan pengaduan di atas telah dikomunikasikan dengan pimpinan
dan admin unit kerja yang bersangkutan serta sekiranya telah selesai
tidak lanjutnya.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan arahan Bapak Inspektur
Jenderal kami ucapkan terima kasih.

PE Inspektur II


Bayu Fajar Nugroho

Terselamatkan

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur I;
3. Inspektur II;
4. Inspektur IV.

NOTA DINAS
Nomor 25-12-IND.SP4N/2024

Kepada Yth : Inspektur Jenderal
Dari : PL Inspektur II
Perihal : Laporan Triwulan I (Baku) Tahun 2024 Kegiatan
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik
di Lingkungan Kementerian Perindustrian melalui SP4N-
LAPORI
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 2 April 2024

Berkaitan dengan arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengaduan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tata Pengaduan dan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPORI di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024, berikut kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan tindak lanjutnya untuk periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Berdasarkan kanal pengaduan SP4N-LAPORI www.lapori.go.id, diperoleh pengaduan sebanyak sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan pengaduan dengan media: Januari sebanyak 11 laporan pengaduan, Februari sebanyak 4 laporan pengaduan, dan Maret sebanyak 6 laporan pengaduan.
2. Jenis laporan pengaduan yang diterima dapat diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Pengaduan tidak berkadar pengaduan: 15 laporan
 - b. Pemerasan informasi : 2 laporan
 - c. Aspremi : 2 laporan
3. Status Tindak Lanjut atas 21 laporan pengaduan berdasarkan unit kerja sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebanyak 4 laporan pengaduan di triwulan I tahun 2024 dan 2 laporan pengaduan di tahun 2023 Belum Dilaksanakan
 - b. Direktorat Jenderal KPMI sebanyak 3 laporan pengaduan dalam proses tindak lanjut
 - c. Direktorat Jenderal LMAFE sebanyak 3 laporan pengaduan dalam proses tindak lanjut dan 2 laporan pengaduan sebagai tindak lanjutnya
 - d. Direktorat Jenderal KFT sebanyak 1 laporan pengaduan dalam proses tindak lanjut
 - e. BPSCAM sebanyak 1 laporan pengaduan dalam proses tindak lanjut
 - f. PHPPON sebanyak 1 laporan pengaduan dalam proses tindak lanjut
 - g. Pusdatin sebanyak 1 laporan pengaduan dalam proses tindak lanjut

- h. BSKB sebanyak 2 laporan pengaduan sebagai tindak lanjutnya.
4. Seluruh laporan pengaduan di atas telah dikomunikasikan dengan pimpinan dan admin unit kerja yang bersangkutan, namun masih terdapat 6 laporan pengaduan yang belum ditindaklanjuti pada unit kerja Sekretariat Jenderal dengan alasan sebagai berikut. Adapun kendala belum ditindaklanjuti sebagai berikut:
Biro Human telah mendapatkan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektur Jenderal perihal pemusatan pemaduan sistem SP4N LAPOR pada tanggal 1 Maret 2024, namun sampai saat ini belum ada admin terkait SP4N LAPOR. Pada awal bulan Maret 2024 telah ada diskusi dari PL Kepala Biro Human, namun belum ditindaklanjuti karena perlu diskusi antara Kepala Biro Human dengan Kepala Tim Kerja.
5. Selain itu karena adanya beberapa laporan pengaduan terkait dengan kualitas komunikasi tatap muka di Unit Pelayanan Publik (UPP), saat ini telah ada perbaikan dalam pengelolaan arahan komunikasi tatap muka di UPP.

Dari hal-hal tersebut, atas perhatian dan arahan Bapak Inspektur Jenderal telah lanjut kami sampaikan sebagai berikut:

PL Inspektur II


Bayu Fajar Nugroho

Terdistribusi:

1. Sekretaris Inspektur Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur IV



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT II**

Dalam Rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Fajar Nugroho

Jabatan : PIt, Inspektur II

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : M. Rum

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2024

Inspektur Jenderal,

M. Rum

PIt, Inspektur II,

Bayu Fajar Nugroho

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2024**

TUJUAN

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian*) IKU	3,00	Indeks

Customer Perspective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK. 1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	0,8	Persen
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat II	100	Persen
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II	92,2	Persen
SK. 2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	3,00	Indeks

Total Anggaran Tahun 2024 : Rp3.450.000.000,-

(Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Inspektur Jenderal,



M. Rum

Jakarta, 24 Januari 2024

Pt. Inspektur II,



Bayu Fajar Nugroho

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2024

Internal Process Prespective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK. 3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85	Persen
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80	Persen
SK. 4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II* JIKU	90	Persen

Learn and Growth Prespective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK. 5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100	Persen
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

Jakarta, 14 Januari 2024
Ptl. Inspektur II


Bayu Fajar Nugroho



NOTA DINAS

NOMOR 28/IJ-IND.3/KP/VII/2024

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Perihal : Perjanjian Kinerja Inspektur II Kementerian Perindustrian
Lampiran : 3 Lembar
Tanggal : 9 Juli 2024

Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur II Inspektorat Jenderal Tahun 2024. Apabila tidak ada pertimbangan lain, mohon Bapak dapat menandatangani dokumen dimaksud.

Demikian disampaikan, atas arahan dan berkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Inspektur II,

Winky Angga Priatna

Tembusan :
Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT II**

Dalam Rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winky Angga Priatna

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

Nama : M. Rum

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2024

Inspektur II,

Inspektur Jenderal,

M. Rum

Winky Angga Priatna

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2024**

TUJUAN

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	3.00	Indeks

Customer Perspective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK.1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	0.8	Persen
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat II	100	Persen
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat II	92,2	Persen
SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *) IKU	3.00	Indeks

Total Anggaran Tahun 2024 : Rp3.450.000.000,-

(Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Inspektur Jenderal,



M. Rum

Jakarta, Juli 2024

Inspektur II,



Winky Angga Priatna

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2024**

Internal Process Prespective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK. 3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	85	Persen
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80	Persen
SK. 4	Meningkatkan Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II*(IKU	90	Persen

Learn and Growth Prespective

Kode SK	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK. 5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	100	Persen
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

Jakarta, Juli 2024
Inspektur II



Winky Angga Priatna

Survey Kepuasan Pelanggan Inspektorat II Tahun 2024

Triwulan I Tahun 2024

Hasil SKM dengan skala 0 sd 4	Nilai SKM	Konversi	Konversi dalam persentase	Kesimpulan
Hasil SKM (bobot sama untuk semua pertanyaan)	3.45	86.25	86.25%	Baik

Triwulan II Tahun 2024

Hasil SKM dengan skala 0 sd 4	Nilai SKM	Konversi	Konversi dalam persentase	Kesimpulan
Hasil SKM (bobot sama untuk semua pertanyaan)	3.58	89.57	89.57%	Sangat Baik

Triwulan III Tahun 2024

Hasil SKM dengan skala 0 sd 4	Nilai SKM	Konversi	Konversi dalam persentase	Kesimpulan
Hasil SKM (bobot sama untuk semua pertanyaan)	3.66	91.50	91.50%	Sangat Baik

Triwulan IV Tahun 2024

Hasil SKM dengan skala 0 sd 4	Nilai SKM	Konversi	Konversi dalam persentase	Kesimpulan
Hasil SKM (bobot sama untuk semua pertanyaan)	3.59	89.73	89.73%	Sangat Baik

Tahun 2024

Hasil SKM dengan skala 0 sd 4	Nilai SKM	Konversi	Konversi dalam persentase	Kesimpulan
Hasil SKM (bobot sama untuk semua pertanyaan)	3.57	89.26	89.26%	Sangat Baik

**Perhitungan TABEL INSPEKTORAT II
Tahun 2024**

Triwulan I Tahun 2024				Realisasi SD TW IV
Kegiatan	Ketua Tim	Nilai	Rata-Rata	
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Agung Tri Utomo	100	93,25	
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Denny Chandra Arifin	83		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Riko Lesmana Oetarmann	90		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Zita Tessa Rahayani	100		
Triwulan II Tahun 2024				94,75
Kegiatan	Ketua Tim	Nilai	Rata-Rata	
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Zita Tessa Rahayani	100	95,5	
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Riko Lesmana Oetarmann	90		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Denny Chandra Arifin	83		
Audit Kinerja pada Ditjen ILIMATE	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi Lampung	Dwi Harjanto	100		
Audit Dana Dekonsentrasi Bali	Agung Tri Utomo	100		
Triwulan III Tahun 2024				94,75
Kegiatan	Ketua Tim	Nilai	Rata-Rata	
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Banten	Riko Lesmana Oetarmann	85	95,50	
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Jawa Barat	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop DKI Jakarta	Riko Lesmana Oetarmann	85		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Jawa Tengah	Dian Novita Sari	83		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Jawa Timur	Zita Tessa Rahayani	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop Kalimantan Utara	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Kalimantan Tengah	Nisa Saifullah	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag NTT	Zita Tessa Rahayani	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop Papua	Agung Tri Utomo	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindagkop Sulbar	Yansen AS	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 Pada Disperindag Sulawesi	Riko Lesmana Oetarmann	85		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2024 Pada Disperindag Sukut	Zita Tessa Rahayani	100		
Audit Dana Dekonsentrasi TA 2024 Pada Disperindag Sumsei	Dwi Harjanto	100		



NOTA DINAS

Nomor: 1097 /J-IND.1/PW/XII/2024

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023/2024
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Tanggal : 12 Desember 2024

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 1552/J-IND/ST/2024 tanggal 5 November 2024 telah dilaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap Penilaian Mandiri (PM) atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan hasil sebagai berikut:

1. Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.
2. Penilaian SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian pada tahun 2024 direncanakan menggunakan aplikasi dari BPKP, namun karena adanya gangguan server aplikasi BPKP sehingga penilaian mengalami kemunduran yang semestinya dilaksanakan pada bulan Agustus penilaian mandiri (PM) telah selesai dilaksanakan tapi baru selesai bulan Oktober dengan penilaian secara manual menggunakan Ms.Excel. Penjaminan Kualitas (PK) dilakukan setelah PM selesai yaitu dilaksanakan pada bulan November 2024.
3. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Komponen	Hasil PM	Hasil PK
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,291	3,714
2.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	4,297	3,728
3.	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	4,084	3,996
4.	Nilai Kapabilitas APIP	3,000	3,000

Perbedaan nilai disebabkan adanya koreksi terhadap hasil Penilaian Mandiri, untuk struktur dan proses yang merupakan komponen dari penilaian maturitas SPIP sebagian nilai disesuaikan karena belum ada pedoman evaluasi terpisah dan belum dilaksanakannya evaluasi tersebut.

4. Setelah dilaksanakan Penjaminan Kualitas, secara umum masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan

- Perlu dilakukan reviu atas sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan sasaran rincian output beserta indikator-indikator kinerjanya dan target indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai. Reviu dilakukan antara lain terkait dengan aspek pemberian kriteria *specific, measurable, achievable, reliable, and time bound (SMART)* dalam penetapan indikator kinerja dan metode pengukuran yang digunakan, serta atas penetapan target indikator kinerja yang baik. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024.
- Perlu dilakukan reviu atas keselarasan *cascading* sasaran strategis ke sasaran program, sasaran kegiatan hingga sasaran rincian output termasuk indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan, sesuai dengan ruang lingkup masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024.

b. Struktur dan Proses

- Kementerian Perindustrian saat ini telah memiliki pedoman penyelenggaraan SPiP manajemen risiko namun belum memiliki pedoman evaluasi yang memadai, sehingga perlu segera disusun pedoman evaluasi tersebut. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Inspektorat Jenderal yang ditargetkan dapat diselesaikan pada Mei 2025.
- Saat ini telah disusun peta risiko Kementerian Perindustrian sebagai salah satu bentuk implementasi SPiP, namun perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi secara terpadu atas implementasi SPiP tersebut. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Inspektorat Jenderal yang ditargetkan dapat diselesaikan setelah pedoman evaluasi telah disusun.

c. Pencapaian Tujuan

- Perlu keselarasan dalam *cascading* sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan agar kinerja seluruh unit kerja Eselon I, Eselon II dan Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT) mendukung kinerja strategis (*outcome*) yang ditetapkan untuk dicapai di tingkat Kementerian Perindustrian secara optimal. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Perencanaan dan masing-masing Unit Eselon I yang diharapkan dapat diselesaikan pada Desember 2024.
- Perlu peningkatan kompetensi dan sosialisasi berbagai prosedur/SOP terkait pengelolaan/peranggungjawaban anggaran/belanja bagi para pejabat dan pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk meminimalisir temuan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundangan. Penanggung jawab sub unsur ini yaitu Biro Keuangan yang ditargetkan dapat diselesaikan pada April 2025.

5. Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, kami lampirkan konsep Surat Pernyataan Telah Dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Mutu atas Penyelenggaraan SPiP pada Kementerian Perindustrian. Apabila tidak ada pertimbangan

lain, mohon perkenan Bapak Inspektur Jenderal untuk menandatangani Pernyataan tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada BPKP untuk dilakukan evaluasi.

Demikian Laporan Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Atas perkenan dan arahan Bapak Inspektur Jenderal lebih lanjut, kami sampaikan terima kasih.

§ Sekretaris Inspektorat Jenderal, *sp*


Eni Satrio

Tembusan :

1. Para Inspektur;
2. Kepala Bagian Umum/Ijen;
3. Ketua Tim PK SPIP.